

**KONTESTASI POLITIK ANTARA KESULTANAN DELI DAN
SERDANG DI SUMATERA TIMUR TAHUN 1800-1865**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)**



Oleh:

**FACHRI SYAUQII
NIM : 0602171002**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI BERJUDUL
KONTESTASI POLITIK ANTARA KESULTANAN DELI DAN SERDANG DI
SUMATERA TIMUR TAHUN 1800-1865

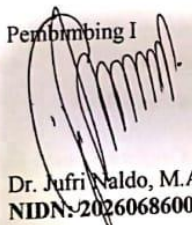
OLEH:

FACHRI SYAUQII
NIM: 0602171002


Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Medan, 19 Oktober 2021

Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Jufri Waldo, M.A
NIDN: 20260686002

Pembimbing II


Nabila Yasmin, M. Phil
NIDN: 2019048902

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam


Yusra Dewi Siregar, M.A
NIP. 197312132000032001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nama :
Lampiran :
Hal : Skripsi an. Fachri Syauqii

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UIN Sumatera Utara Medan
Di Medan

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fachri Syauqii
NIM : 0602171002
Judul : Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli Dan Serdang Di Sumatera Timur Tahun 1800-1865


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan/ Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu sebagai Sarjana Humaniora.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 25 September 2021

Pembimbing I



Dr. Jufri Naldo, M.A
NIDN. 20260686002

Pembimbing II



Nabila Yasmin, M. Phil
NIDN. 2019048902

Pengesahan Skripsi


Skripsi yang berjudul, "**Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli Dan Serdang Di Sumatera Timur Tahun 1800-1865**", An Fachri Syaupi Nim. 0602171002 Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara pada 5 November 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

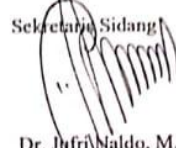
Medan, 05 November 2021

Panitia Sidang Munaqasyah
Prodi Sejarah Peradaban Islam
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang



Yusra Dewi Siregar, M. A
NIP. 197312132000032001



Dr. Jufri Naldo, M. A
NIP. 198606262015031007

Anggota

Penguji I



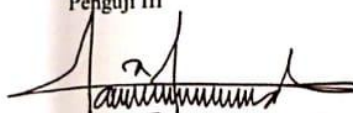
Dr. Jufri Naldo, M. A
NIDN. 20260686002

Penguji II



Dr. Irwansyah, M. Ag
NIDN. 2016106101

Penguji III



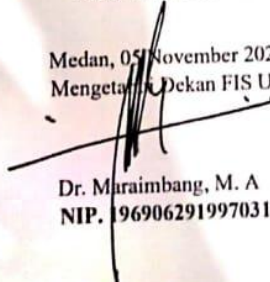
Dr. Muhammad Faishal, M.Us
NIDN. 0109118402

Penguji IV



Nabila Yasmin, M. Phil
NIDN. 2019048902

Medan, 05 November 2021
Mengetahui Dekan FIS UINSU



Dr. Muraimbang, M. A
NIP. 196906291997031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachri Syauqii
NIM : 0602171002
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 03 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam,
Fakultas Ilmu Sosial UINSU Medan
Alamat : Jl. Camar II, No. 182 P. Mandala

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865”**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2021
membuat pernyataan



Fachri Syauqii
Fachri Syauqii
NIM: 0602171002

ABSTRAK



Nama : Fachri Syauqii
NIM : 0602171002
Pembimbing I : Dr. Jufri Naldo, M. Hum
Pembimbing II : Nabila Yasmin, M. Phil
Judul : *Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865.*

Kajian mengenai Sumatera Timur tidak terlepas dari perpolitikan. Kesultanan Deli pada masa Tuanku Panglima Paderap yang mengalami perselisihan dalam menentukan siapa pengganti dirinya. Diantara putra mahkota, terjadi perebutan kekuasaan antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar Junjungan. Untuk menghindari perang saudara maka Tuanku Umar mendirikan Kesultanan Serdang dan dinobatkan sebagai Sultan Serdang pertama. Kontestasi politik diantara keduanya terus berlanjut pada tahun 1800-1865 M. Kedua kesultanan memainkan strategi politiknya demi kepentingannya masing-masing. Belanda mengintervensi kedua kesultanan ini dengan tujuan keuntungan ekonomi pada tahun 1862 M. Selama kegiatan ekonomi, kedua kesultanan melakukan ekspor lada ke Penang dan Malaka. Saat itu, lada merupakan komoditi yang banyak dicari oleh pihak asing. Dampak yang dirasakan dari kontestasi politik adalah perbedaan sistem pemerintahan, perebutan wilayah kekuasaan dan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang serta mengetahui dampak dari kontestasi tersebut. penelitian ini menggunakan metodologi sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu naskah perjanjian, baik antara Kesultanan Deli dan Serdang dengan pihak kolonial. Sumber sekunder dengan mengambil dari data melalui wawancara, beberapa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan kedua kesultanan tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus, dimana kontestasi politik pada Kesultanan Deli dan Serdang, sehingga mendapatkan hasil keterangan bagaimana kontestasi politik antara keduanya serta dampak yang dirasakan setelahnya.

Kata Kunci: Sumatera Timur, Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kontestasi Politik

ABSTRACT



Name	: Fachri Syauqii
NIM	: 0602171002
Advisor I	: Dr. Jufri Naldo, M. Hum
Advisor II	: Nabila Yasmin, M. Phil
Title	: <i>Political Contest Between Deli and Serdang Sultanates in East Sumatra 1800-1865.</i>

The study of East Sumatra cannot be separated from politics. The Deli Sultanate during the time of Tuanku Panglima Paderap had a dispute to determine who would succeed him. Among the crown princes, there was a power struggle between Tuanku Panglim Pasutan and Tuanku Umar Junjungan. To avoid civil war, Tuanku Umar established the Sultanate of Serdang and crowned the first Sultan of Serdang. The political struggle between them continued from 1800-1865 AD. Both sultanates played their political strategies for their interests. The Dutch intervened between these two sultanates with the aim of economic gain in 1862 AD. During their economic activities, the two sultanates exported pepper to Penang and Malacca. At that time, pepper was a commodity that was sought after by foreigners. The perceived impact of political contestation is the difference in government systems, the struggle for territory and the economy.

This study aims to determine the political contestation between the Deli and Serdang Sultanates and to determine the impact of the contestation. This study uses historical methodologies, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources of data used in this study, including primary and secondary sources. The primary source is the text of the agreement, both between the Deli and Serdang Sultanates and the colonial party. Secondary sources by taking data through interviews, several books, theses, and journals related to the two sultanates. The analysis method used is deductive, namely drawing conclusions from the general to the specific, where the political contestation in the Deli and Serdang Sultanates, so as to obtain information on how the political contestation between the two and the impact felt afterwards.

Keywords: East Sumatra, Deli Sultanate, Serdang Sultanate, Political Contest

PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dengan melafazkan *Alhamdulillah rabbil 'alamiin*. Tidak lupa penulis mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga ampunan dan *syafaatnya* tercurahkan kepada ahlul bait, para sahabatnya, dan pengikutnya. Sebagai salah satu syarat untuk menamatkan studi dan mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Maka dari itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: “*Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865*”.

Setelah melewati beberapa tahapan bimbingan dan penulisan, disertai dengan berkat pertolong Allah SWT, doa dari kedua orang tua, masukan dari kedua orang pembimbing, serta dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya skripsi ini selesai dan dapat terwujud. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor dan wakil Rektor UIN Sumatera Utara yang telah memfasilitasi proses studi penulis.
2. Dekan, wakil dekan, dan seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara.
3. Kaprodi dan Sekprodi, Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara yang selalu memberi semangat kepada penulis. Ibu Yusra Dewi Siregar, M.A. dan Bapak Dr. Jufri Naldo, M.A.
4. Dr. Jufri Naldo, M.A. dan Ibu Nabila Yasmin, M.Phil. Kedua orang pembimbing yang tak pernah lelah dalam memeriksa, mengoreksi, dan memberikan masukan-masukan guna menjadikan skripsi penulis lebih baik. Tanpa arahan dan bimbingan mereka berdua, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Para dosen penulis yang berada di jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara, staf, dan seluruh civitas akademika lainnya, yang banyak membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Pak Muhammad Yasser Arafat, M.A. yang dengan sukarela mencari sumber-sumber dan data-data terkait penelitian dalam skripsi ini, semoga menjadi lading amal bagi beliau.
7. Pak Ahmad Muhajir, M.Hum dan Muhammad Irfan, M.Hum yang merupakan guru penulis yang sangat banyak memberikan masukan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Bahkan, mereka berdua ikut berkontribusi dalam memberikan judul skripsi ini kepada penulis. Terima kasih ilmu dan jasa-jasanya semoga menjadi ladang amal bagi mereka berdua.
8. Pak Syaiful Anwar, M.A yang merupakan guru penulis yang sama-sama menyukai bacaan sastra, beliau juga memberikan ilmu serta dukungan moralnya bagi penulis meski beliau sekarang sudah menetap di Bukit Tinggi. Terima kasih atas ilmunya semoga menjadi ladang amal bagi beliau.
9. Terkhusus ucapan terima kasih kepada abangda Adam Zaki Gultom, S.Pd yang telah membantu mengoreksi tulisan ini sehingga tulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
10. Seluruh kawan-kawan di komunitas WeRead (Kitabaca) dan Historical Sumut yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada para Narasumber, yaitu Ibu Tengku Mira Rozanna Sinar, M.Hum, Bapak Tengku Moharsyah dan Bapak Dr. Suprayitno, M.Hum yang telah bersedia memberikan data-data tambahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Kepada kawan-kawan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2017 yang semuanya saat ini sedang berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir, semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah SWT.

13. Kepada teman-teman SPI-A yang memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis.
14. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Drs. O.K. Ahmad Yani Kisno dan Ibu Apriyani, yang berkat doa dan restu dari mereka, serta curahan rasa kasih sayangnya yang sangat luar biasa kepada penulis, sehingga penulis termotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Terkhusus kepada ketiga senior Sejarah Peradaban Islam angkatan 2016, yaitu abangda Taslim Batubara, S.Hum, kakak Aini, S.Hum dan abangda Rudi Khoirudin, S.Hum yang banyak meluangkan waktunya dalam memberi bimbingan serta masukan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
16. Terkhusus kepada ketujuh sahabat penulis, yaitu Siti Mariam, Ning Arrumdani, Ira Fitri Lestari, Suri Daehsan Purba, Reza, Fadhlán, dan Padli yang tidak merasa jenuh dalam memberikan nasihat, doa serta dukungan semangatnya kepada penulis.

Sekali lagi, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tak sempat dituliskan dalam kata pengantar ini. Penulis merasa memiliki kekurangan serta tentunya kesilapan, hal ini merupakan keterbatasan dalam diri penulis. Selanjutnya, penulis sangat menyadari akan jauhnya kata sempurna dari tulisan skripsi ini. Sehingga penulis mengharap kritik dan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa penulis selalu memohon ridha dan doa kepada Allah SWT agar skripsi ini berguna bagi khalayak ramai, terutama buat para akademisi yang berfokus pada Kesultanan di Sumatera Timur, khususnya Deli dan Serdang. Selamat membaca, semoga karya ini memberikan khazanah pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir bagi para pembaca.

Medan, 19 Agustus 2021

Penulis,

Fachri Syauqii

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK.....	i
DAFTAR PUSTAKA	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Teori Konflik	9
B. Definisi Konseptual	12
C. Kajian Terdahulu	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
A. Metode Dan Pendekatan Penelitian	18
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Instrumen Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Sistem Politik-Pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang	26
B. Perpecahan Antara Kesultanan Deli dan Serdang.....	39
C. Pengaruh Aceh, Siak, dan Intervensi Pihak Asing di Kesultanan Deli-Serdang	53
D. Dampak Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	70

Daftar Gambar

- Gambar 1** : Struktur Pemerintahan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur
- Gambar 2** : Lambang Kesultanan Deli
- Gambar 3** : Lambang Kesultanan Serdang
- Gambar 4** : Naskah *Acte van Erkenning* Kesultanan Serdang
- Gambar 5** : Naskah *Acte van Erkenning* Kesultanan Deli
- Gambar 6** : Kondisi Pelabuhan di Labuhan Deli Tahun 1886

Daftar Tabel

Tabel 1 : Daftar nama-nama informan penelitian

Tabel 2 : Daftar informasi kegiatan ekspor lada Kesultanan Deli dan Serdang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Sumatera Timur terdapat beberapa Kesultanan, yaitu Deli dan Serdang. Terdapat beberapa Kesultanan lainnya, seperti Langkat, Asahan dan Kota Pinang. Juga terdapat beberapa kedatukan kecil, seperti Kedatukan Sunggal, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan sebagainya. Beberapa dari kedatukan kecil ini nantinya masuk kedalam wilayah kekuasaan Kesultanan Deli atau Serdang. Menurut Sinar dalam bukunya yang berjudul “*Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*” bahwa beberapa kedatukan kecil yang berada di bawah Kesultanan Serdang seperti Kedatukan Perbaungan, Araskabu, Tanjong Morawa dan Kampong Baru serta Negeri Denai. Sementara kedatukan kecil yang berada di bawah Kesultanan Deli adalah Kedatukan Sunggal, Serbanyaman, Serbajadi, Bedagai (Tuanku Luckman Sinar, 2006, p. 87).

Secara geografis, wilayah Sumatera Timur berada pada garis khatulistiwa dan memiliki garis lintang utara 4⁰. Kemudian wilayah ini berbatasan dengan Aceh di Barat Laut, Tapanuli di Barat Daya, Bengkulu di Tenggara dan Selat Malaka di Timur Laut. Luas wilayahnya berkisar 31.715 kilometer persegi atau 6,7% dari seluruh daerah Sumatera. Wilayah ini memiliki iklim pantai tropic yang sifat iklim mikronya dipengaruhi oleh topografi seperti daerah-daerah tanah tinggi, diantaranya dataran tinggi Karo, pegunungan Simalungun, dan pegunungan Habinsaran (Pelzer, 1985, p. 31).

Kondisi tanah di Sumatera Timur termasuk subur karena didukung oleh keadaan iklimnya. Hal ini tentunya membantu dalam bidang pertanian sehingga menjadi mata pencarian pokok masyarakat. Anderson dalam Pelzer mengemukakan bahwa kampung yang terletak di tepi sungai sangat subur

sehingga ditumbuhi oleh beberapa tanaman, seperti kelapa sawit, pohon buah-buahan dan rumpun-rumpun bambu (Pelzer, 1985, p. 20). Sumatera Timur memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Seiring berjalannya waktu, Sumatera Timur menjadi perhatian bagi beberapa pihak, seperti Pemerintah Inggris, Kolonial Belanda, Kesultanan Aceh, Siak, Deli, dan Serdang.

Sebelum berdirinya Kesultanan Deli, Kerajaan Aru merupakan kerajaan yang paling tua. Beberapa literatur dan catatan perjalanan menyebutkan tentang Kerajaan Aru. Dalam *Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)*, disebutkan bahwa seorang nakhoda kapal bernama Syekh Ismail dari Mekah berlayar bersama Sultan Muhammad. Menurut catatan tersebut, Sultan Muhammad meninggalkan kerajaannya untuk pergi berlayar dan menjadi seorang yang fakir. Mereka berlayar ke Lamiri, Perlak, Aru, dan Samudera. Kemudian, diceritakan bahwa mereka berhasil mengislamkan penduduk wilayah-wilayah tersebut (Ahmad, 1979, p. 53).

Munculnya kerajaan Deli, disebabkan Gocah Pahlawan mendapat fitnah dari Kerajaan Aceh bahwa istrinya melakukan perbuatan jahat dengan putra raja Aceh. Maka, dari sini ia dan beberapa pengikutnya meninggalkan Aceh ke wilayah yang telah dikuasainya dengan mendirikan Kerajaan baru bernama Deli (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 35). Kerajaan Deli telah resmi lepas dari pengaruh Aceh dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1669 M. Nama resmi kerajaan ini adalah *Kerajaan Al-Mu'tasim Billah Deli*. Wilayah Deli mencakup kota Medan saat ini, Langkat, Suka Piring, Buluh Cina, dan beberapa negara kecil lainnya di sekitar pesisir Timur Sumatera. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat dan maju di kawasan Selat Malaka (Takari, 2012, p. 70).

Menurut Sinar, berdirinya Kesultanan Serdang akibat konflik yang terjadi dalam kubu Kesultanan Deli sehingga mengakibatkan pecahnya kekuasaan pada tahun 1723 M. Untuk menghindari perang saudara, maka dua orang besar dari Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah dengan Raja Urung Batak Timur dan seorang pembesar dari Aceh mengangkat Tuanku Umar Johan

Alamsyah sebagai Sultan Serdang yang pertama (Tuanku Luckman Sinar, 2006, p. 55). Ia merupakan putra dari Kesultanan Deli yang ke III bernama Tuanku Panglima Paderap. Ia kemudian berpindah dan meletakkan pusat kekuasaannya di Kampung Besar (Serdang) (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

Wilayah yang menandai perbatasan antara Kesultanan Deli dan Serdang diantaranya wilayah Utara yang berbatasan dengan Langkat dan Selat Malaka, bagian Selatan yang berbatasan dengan Simalungun dan Kesultanan Deli, bagian Timur yang berbatasan dengan Kesultanan Asahan dan Selat Malaka, dan di bagian Barat berbatasan dengan Tanah karo dan Tapanuli (Sufi, 2000, p. 47).

Menurut Perret, terjadi situasi yang tidak menentu di Pesisir Timur Laut Sumatera, daerah tersebut menjadi sasaran perebutan kedaulatan antara Aceh dan Siak. Dua kerajaan ini sama-sama memiliki pengaruh yang kuat untuk memperebutkan wilayah Sumatera Timur. Dalam rentang waktu tersebut, untuk mengurangi pertikaian para Kesultanan setempat memilih jalan tengah, maka ada ucapan "*Beraja ke Aceh, Bertuan ke Siak*". Oleh karena itu, Kesultanan setempat memberikan upeti dan kesetiaan kepada keduanya. Hal ini terlihat ketika bahwa Kesultanan Deli berada di bawah kendali Kerajaan Aceh. Namun, di lain hal Deli juga dianugerahkan gelar "sultan" dari Kerajaan Siak. Empat puluh tahun kemudian, anak Sultan Amaluddin Panglima Mangedar Alam, bernama Sultan Osman Perkasa Alam terpaksa tunduk kepada Aceh karena penyerangan yang dipimpin oleh Pangeran Husin. Alhasil, ia diberi gelar sebagai wakil sultan Aceh serta menerima cap Sembilan dan *bawar* (senjata tajam) dari Aceh. Sementara Kesultanan Serdang sebagai orang besar (*wazir*) Sultan Aceh (Perret, 2010a, p. 131).

Dalam menjalankan pemerintahan, ruang gerak Sultan Deli dan Serdang sangat sempit dan hanya sebatas simbol. Jalannya roda pemerintahan tergantung kesetiaan kalangan elit yang terdiri dari para *tengku*, *datuk*, dan *orang kaya*. Kemudian ada empat orang besar lain yang disebut "*Datuk Empat Suku*", yaitu pemimpin-pemimpin *urung* XII Kota, Sunggal, Sukapiring, dan Senembah. Mereka bertugas serta berunding mengenai calon pengganti sultan dilihat dari tingkah laku

dan sifat anak sulung, kemudian mereka juga memiliki hak pilih terhadap penyandang gelar tengku besar (menteri) (Perret, 2010a, pp. 141–142)

Perebutan wilayah Sumatera Timur kian menarik kala Eropa menunjukkan perhatiannya terhadap potensi sumber daya alam dan perdagangan. Diantaranya Inggris dan Belanda saling berebut pengaruh dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi di pesisir Timur Sumatera. Keduanya saling menggunakan politik *divide et impera* (politik adu domba) dan memanfaatkan persaingan antara Kesultanan Deli dan Serdang untuk saling berperang.

Pada 1 Februari 1858, Belanda mulai bekerja sama dengan Siak Sri Inderapura ketika seorang petualang dari Inggris bernama Adam Wilson ingin melakukan pemberontakan. Kolonial Belanda mulai memperluas daerah kekuasaannya termasuk Deli, Serdang dan Langkat. Tujuannya adalah untuk memperluas kepentingan Belanda di Sumatera Timur dan mengadakan pemulihan keadaan ekonomi Belanda (Pelzer, 1985, p. 27).

Dampak perekonomian yang dirasakan saat kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang yaitu kegiatan ekspor lada. Kedua kesultanan tersebut saling mengikat perjanjian dagang dengan Penang. Dalam sejumlah laporan Inggris pada tahun 1815 dan 1822 terjadi peningkatan ekspor lada sepuluh kali lipat ke Penang. Pada tahun 1822, Deli mengekspor lada sekitar 26.000 pikul dan Serdang sekitar 8.000 pikul (Perret, 2010a). Kesultanan Serdang juga melakukan kegiatan perdagangan dengan Penang dan Malaka. Antara dua kesultanan tersebut terikat perjanjian yaitu cukai pelabuhan Labuhan Deli dibagi menjadi dua antara Deli dan Serdang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pertikaian antara keduanya (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 113).

John Anderson setidaknya mencatat potensi perdagangan lada di Sumatera Timur. Ia melaporkan bahwa ekspor lada di tahun 1820-1823 bergerak secara fluktuatif. Maka dari itu, John Anderson mendedikasikan dirinya untuk mencari sumber yang berasal dari material mentah. Kepentingannya untuk mengembangkan pasar-pasar baru dalam industri manufaktur di Inggris (Lailatussyukriyah, 2014).

Pada tahun 1823, Penang mengirim John Anderson ke Sumatera Timur untuk meyakinkan para sultan melanjutkan perdagangan bebas dengan Penang. Kesultanan Deli dan Serdang menyambut baik hal tersebut, maka pelabuhan-pelabuhan akan tetap terbuka bagi perdagangan Inggris (Reid, 2007, p. 11).

Untuk dampak perluasan wilayah, pada tahun 1825, Sultan Osman Perkasa Alam memperluas wilayah kekuasaan Deli yang mencakup Sunggal dan Buluh Cina. Sultan Osman pernah mengekspansi wilayah Sukapiring namun gagal. Tahun berikutnya, Kesultanan Deli kembali mengekspansi wilayah dari kekuasaan Serdang yang dipimpin oleh Sultan Basyarudin, seperti Denai, Senembah, Padang (sekarang bernama Tebing Tinggi), dan Bedagai. Sedangkan Kesultanan Serdang memperluas pengaruhnya hingga ke Tanah Alas dan Singkel.

Pengaruh politik Kesultanan Deli lebih kuat daripada Serdang. Ini dikarenakan pemimpin-pemimpin lain yang ada di Sumatera Timur jika ingin memohon bantuan kepada Aceh harus melalui Deli. Sedangkan Serdang hanya menjadi orang besar (*wazir*) bagi Aceh. Ketika Belanda mulai menancapkan pengaruhnya dengan mengangkat Baron Caets De Raet sebagai kontrolir di Sumatera Timur. Tahun 1861, Sultan Deli mendapat dukungan dari Pemerintah Kolonial untuk merebut wilayah Percut, Padang, Bedagai, Sunggal, serta wilayah yang menjadi kekuasaan Serdang yaitu Denai (Tuanku Luckman Sinar, 1971, pp. 177–178).

Wilayah Pesisir Timur Laut banyak pertikaian serta saling berebut pengaruh oleh kerajaan-kerajaan lokal dan pihak kolonial. Sedikitnya pembahasan mengenai kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang tahun 1800-1865 oleh para sejarawan atau akademisi, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh menggali konflik-konflik serta dampaknya yang terjadi di Sumatera Timur pada tahun tersebut. Selain itu, pembahasan mengenai kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang di tahun 1800-1865, perlu diketahui oleh masyarakat luas, terutama untuk generasi muda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi identifikasi masalah, ialah:

1. Wilayah Sumatera Timur terdapat beberapa kesultanan, seperti Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Langkat, Kesultanan Asahan, dan sebagainya. Pada tahun 1723, terjadi perpecahan dalam kubu Kesultanan Deli yang melahirkan Kesultanan Serdang. Maka, perlu ditelusuri kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang pada tahun 1800-1865 serta kepentingan apa yang ingin mereka cari.
2. Kesultanan Deli yang ada di Sumatera Timur mengalami konflik internal di tahun 1723, sehingga melahirkan Kesultanan Serdang. Kesultanan Deli dan Serdang terus mengalami konflik bahkan ada rasa ketidakcocokan diantara keduanya. Ditambah kedatangan kolonial Belanda yang juga ingin merebut wilayah Sumatera Timur untuk kepentingan mereka. Kemudian, perlu ditelusuri apa dampak yang terjadi selama berlangsungnya kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang tahun 1800-1865.

C. Batasan Masalah

Luasnya permasalahan yang akan dibahas serta dikaji, maka fokus permasalahan akan dibatasi agar penelitian ini lebih fokus, mendalam dan sempurna. Berdasarkan masalah di atas maka, penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini adalah : Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865. Lingkup spasial yang akan dibahas oleh penulis adalah Kesultanan Deli dan Serdang, untuk lingkup temporal periode 1800-1865.

Tahun 1800-an merupakan tahun dimana kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang semakin mengerucut. Hal ini dilihat dari perebutan suksesi, wilayah, dan ekonomi antara Sultan Deli dan Serdang.

Perebutan suksesi diawali pada tahun 1723, ketika keempat anak dari Tuanku Panglima Paderap merasa layak menggantikannya. Kemudian, perebutan ini semakin meruncing antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar yang keduanya berkeinginan untuk menggantikan posisi ayahnya.

Untuk perebutan wilayah, antara Kesultanan Deli dan Serdang saling berkeinginan untuk memperluas wilayah kadaulatannya. Dalam segi ekonomi, keduanya saling melakukan kegiatan ekspor dan bekerja sama dengan Penang dan Malaka pada tahun 1822 M. Bahkan Kesultanan Serdang pernah menghalangi kegiatan ekspor Deli ke Penang dengan cara meletakkan ranjau bambu di hulu Sungai Deli. Sementara, tahun 1865 dipilih berdasarkan tahun dimana antara Kesultanan Deli dan Serdang telah tunduk dan mengakui pemerintahan Hindia-Belanda di Sumatera Timur.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dan lebih mempermudah peneliti merumuskan masalah penelitian yang lebih objektif, maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur pada tahun 1800-1865?
2. Apa dampak ekonomi, politik dan perluasan wilayah dari kontestasi politik pada Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur pada tahun 1800-1865?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontestasi politik yang ada di Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur pada tahun 1800-1865.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur pada tahun 1800-1865.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai kontestasi politik yang ada di Sumatera Timur pada tahun 1800-1865.
2. Sebagai bahan literatur bagi peneliti dan akademisi yang ingin meneliti masalah yang sama.
3. Sebagai pengetahuan bagi peneliti dalam pembuatan karya ilmiah.
4. Memberikan pengetahuan tentang dampak atau pengaruh dari kontestasi politik yang ada di Sumatera Timur di tahun 1800-1865.

G. Sistematika penulisan

Dalam menyajikan laporan dan penulisan penelitian, dengan memberikan gambaran yang jelas serta sistematis mengenai materi yang terkandung dalam skripsi ini. Penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I, membahas pendahuluan yang didalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas landasan teoritis yang didalamnya berisi tentang teori konseptual yang sesuai dengan judul penelitian. Kerangka konseptual membahas variable yang berkaitan dengan judul penelitian serta kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

BAB III, membahas Metodologi Penelitian yang didalamnya berisi tentang Metode dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data

BAB IV, membahas Hasil dan Pembahasan yang didalamnya berisi hasil-hasil temuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian. Baik dari studi pustaka, riset lapangan, dan hasil wawancara.

BAB V, setelah menjelaskan hasil serta bahasan secara lengkap, bab ini mencoba untuk mengambil beberapa intisari, saran, serta masukan yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Konflik

Konflik merupakan salah satu teori sosial. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai teori ini, mengutip dalam jurnal yang ditulis oleh Seokanto dan Sulistyowati berjudul *Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel*, bahwa pertentangan (konflik) bisa terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Individu juga memiliki kepentingan dan mempunyai fungsi sosial. Maka, muncul pertentangan antara individu dan kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, hal ini bisa menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan (Mas'udi, 2015).

Mengutip dari Pip Jones, asal mula terjadinya konflik di masyarakat banyak terdapat struktur ketidaksetaraan. Misalnya saja tidak setara antara kelompok etnis, antara tua dan muda, laki-laki dan perempuan, pekerjaan yang berbeda, sistem kepercayaan yang berbeda, dan sebagainya. Maka, struktur ketidaksetaraan ini bisa diasumsikan pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung. ketidaksetaraan ini bisa disebabkan oleh kepentingan yang tak bisa dielakkan antara yang berupaya dengan yang tidak memiliki upaya (Jones, Pip; Bradbury, Liza; Boutillier, 2016).

Kelompok-kelompok yang tidak beruntung pada akhirnya didominasi oleh sebagian kelompok yang beruntung. Kategori penyebutan beruntung atau tidak beruntung dilihat dari kehidupan masyarakat yang memiliki kemudahan akses dan yang tidak. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan sosial dengan adanya kemudahan yang tidak tersebar secara merata, serta eksploitasi kelompok tertentu yang menikmati keuntungan terhadap kelompok yang kurang beruntung. Menurut (Susan, 2019, p. xii) konflik merupakan proses perbenturan antara para aktor dalam merebut sumber daya, baik yang material maupun non material, dimana

setiap aktor memobilisasi sumber-sumber kekuatan tersebut demi meraih pencapaian dan kemenangan. Manusia merupakan makhluk Konflikus (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu memiliki perbedaan, pertentangan, dan persaingan yang dialami secara sukarela maupun keterpaksaan. Menurut (Mulyadi, 2002, p. 1) kehidupan manusia dalam sehari-hari, kapanpun dan dimanapun, tidak terlepas dari yang namanya konflik. Konflik berarti adanya perbedaan atau benturan pendapat antara dua orang atau lebih.

Dalam teori sosiologi konflik yang dikemukakan oleh Weber, adanya unsur dasar dari setiap tipe ideal hubungan sosial, yakni *power*. Menurut Weber, model kekuasaan ada tiga. *Pertama* adalah kekuasaan yang dilihat dari sifat karisma seorang pemimpin atau dilihat dari kualitas pribadi. *Kedua* melalui wewenang tradisional (*traditional authority*) yang bersifat warisan melalui adat kebiasaan dan nilai-nilai kelompok. *Ketiga* adalah wewenang legal formal (*legal-formal authority*) merupakan kekuasaan yang berbasis pada aturan hukum resmi (Susan, 2019, p. 28).

Beberapa ahli sosiologi lainnya, seperti Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang didasari oleh kekuasaan dan wewenang. Dengan cara dominasi atas satu pihak dari pihak lain dengan menggunakan unsur paksaan. Sedangkan menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan perjuangan dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang sifatnya langka, baik itu dengan cara menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan (Rosana, 2015, p. 219).

Kesultanan Deli masih bersifat tradisional yang proses pengangkatannya melalui warisan adat. Kemudian, terjadi perebutan tahta siapa yang akan melanjutkan tampuk kekuasaan Sultan Deli selanjutnya. Tuanku Panglima Pasutan merasa layak untuk menjadi Sultan Deli menggantikan ayahnya, sehingga ia berhasil menyingkirkan adiknya, yaitu Tuanku Umar. Sementara Tuanku Umar merasa haknya diambil, sehingga ia menuntut. Maka Tuanku Umar pun mendirikan Kesultanan Serdang.

B. Definisi Konseptual

1. Politik

Politik memiliki banyak arti serta definisi. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) politik setidaknya memiliki tiga definisi. Pertama, politik adalah segala sesuatu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Kedua, politik adalah segala urusan dan tindakan yang menyangkut pemerintahan negara. Ketiga, politik adalah cara bertindak saat mengalami suatu masalah atau sifat kebijaksanaan. Politik sendiri memiliki akar kata dasar berasal dari Yunani yaitu *Polis*. *Polis* artinya adalah negara-kota.

Dalam bahasa Arab, akan kita dapatkan kata *siyasa* yang memiliki arti pengaturan, bimbingan, pengarahan, serta perbaikan. Jika kita kembangkan istilah *siyasa*, maka akan menjadi *as-siyaasah asy-syar'iyah* (politik syari'ah). Para fuqaha' di bidang politik mendefinisikannya menjadi suatu cara yang memfokuskan kepada segi perilaku dan sosial. Kemudian, politik syar'i dalam definisi lainnya, bisa menjadi suatu cara untuk menyampaikan hukum-hukum, sistem serta kaidah-kaidah dari sisi agama (Al-Utsaimin, 2009, p. 11).

Politik merupakan sebuah ilmu, maka ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Arti politik merupakan usaha mendapatkan kehidupan yang baik. Filsuf Plato dan Aristoteles menganggap bahwa politik adalah salah satu cara untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Ketika hal tersebut telah tercapai, maka ada kesempatan untuk pendidikan, bersosial, dan hidup dalam suasana dengan moralitas yang tinggi (Budiardjo, 2017).

Sementara menurut Deliar Noer, politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang memengaruhi kekuasaan dengan maksud untuk mempertahankan atau mengubah suatu bentuk susunan masyarakat. Kemudian ada beberapa klasifikasi dalam ilmu politik, yaitu kekuasaan, kekerasan, wibawa, pengaruh, hubungan dua pihak, perasaan dan keinginan, kepentingan, nilai, keyakinan dan agama, milik, status dan kelas, tujuan, serta ideologi (Noer, 1983, p. 6).

Pendapat lain dikemukakan oleh Kartini Kartono, ia memberikan definisi politik dari dua aspek, yaitu: secara struktur dan kelembagaan. Menurutnya lagi, politik memiliki arti sebagai berikut: (1) segala hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan (baik itu peraturan, tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan (*policy*), dan sebagainya); (2) negara memiliki hak pada pengaturan dan penguasaan; (3) ada cara untuk memerintah suatu teritorium tertentu; (4) organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintah yang mengatur secara konstitusional dan yuridis formal (Nambo, Abdulkadir; Puluhuluwa, 2005).

Pakar politik lainnya, yaitu Goodin dan Klingemann, menyatakan bahwa politik merupakan penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Kekuasaan sosial yang dimaksud adalah politik mampu mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan Gabriel A. Almond, memberikan definisi yang berbeda mengenai politik, yaitu aktivitas yang dilakukan atas dasar keputusan publik di masyarakat tertentu dan wilayah tertentu, dengan menggunakan instrumen yang bersifat otoritatif dan koersif (Anggara, 2013, p. 3).

Berikut beberapa dalil al-Quran yang berkenaan dengan politik:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Allah menganugerahkan al hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS Al-Baqarah: 269).

2. Kesultanan Deli

Kesultanan Deli didirikan oleh Tuanku Seri Paduka Gocah Pahlawan pada tahun 1632 M. Wilayah kekuasaannya mencakup bekas wilayah kekuasaan Aru, dengan tujuan untuk menghancurkan sisa-sisa kerajaan Aru, menyebarkan ajaran Islam, serta memperluas pengaruh Kesultanan Aceh. Kemudian wilayah kekuasaannya semakin meluas dengan membuka beberapa perkampungan, seperti Kota Bangun, Pulau Berayan, dan Percut (Tuanku Luckman Sinar, 2006, p. 50).

Pada tahun 1805, Kesultanan Deli dipimpin oleh Seripaduka Tuanku Panglima Amaluddin Mangedar Alam. Di masa kepemimpinannya terjadi peperangan serta disintegrasi. Diantara peperangan yang terjadi, yaitu antara Deli dengan Denai, Radin Inu yang mengaku sebagai Raja Pulau Brayan, Kedatukan Sunggal, Serta Sri Sultan Ahmad dari Buluh Cina. Bahkan Deli pernah terlibat dalam perang saudara di Langkat. Hal ini mempengaruhi kondisi perdagangan yang tidak berjalan dengan baik (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 176).

Pada tahun 1825, Kesultanan Deli dipimpin oleh Sultan Osman Perkasa Alam. Masa kepemimpinannya, wilayah Kekuasaan Deli mencakup Sunggal dan Buluh Cina, serta mengekspansi wilayah Sukapiring namun gagal. Beberapa tahun berikutnya, ia kembali memperluas wilayah Kesultanan Deli dengan menyerang wilayah yang menjadi kekuasaan Serdang, seperti Denai, Senembah, Padang (sekarang bernama Tebing Tinggi), Bedagai, serta menghancurkan pemberontakan yang ada di Percut (Tuanku Luckman Sinar, 1971).

3. Kesultanan Serdang

Kesultanan Serdang merupakan pecahan dari Kesultanan Deli, antara putra mahkota saling berebut kekuasaan terhadap Deli, yaitu Tuanku Umar Johan Panglima Alamsyah dan Tuanku Panglima Pasutan. Meskipun pada akhirnya Tuanku Panglima Pasutan yang melanjutkan Kesultanan Deli sepeninggal ayahnya, Tuanku Panglima Paderap.

Seharusnya Tuanku Umar yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Tuanku Panglima Paderap, karena merupakan penerus yang sah. Tuanku Umar

mengalami kekalahan dari Tuanku Panglima Pasutan dalam perebutan tahta kesultanan Deli. Ia dan ibunya meninggalkan Kesultanan Deli dan berpindah ke kampung besar Serdang (sekarang bernama Batang Kuis) dan mendirikan Kesultanan Serdang pada tahun 1723 M.

Pada tahun 1800, Kesultanan Serdang dipimpin oleh Tuanku Ainan Johan Alamsyah. Masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Serdang mencakup Denai, Perbaungan, Percut, Senembah, dan Tanjung Muda. Kemudian, masa Kesultanan Thaf Sinar Basarshah yang memerintah dari tahun 1817-1850, memiliki wilayah jajahan yaitu Bedagai dan Padang (sekarang bernama Tebing Tinggi). Selanjutnya, Kesultanan dipimpin oleh Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah yang memimpin dari tahun 1850. Pada tahun 1865, Sultan Basyarudin harus tunduk kepada Kolonial Belanda. Oleh karena itu, wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang diambil alih oleh Kolonial Belanda dan memberikannya kepada Kesultanan Deli (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

4. Sumatera Timur

Menurut (Tuanku Luckman Sinar, 1971) wilayah Sumatera Timur terbentang dari pantai Tamiang sampai Jambi. Sumatera Timur umumnya didiami oleh masyarakat melayu untuk wilayah pesisir. Sedangkan wilayah pedalaman terdapat suku Karo, Simalungun, perdamaban, dan Mandailing.

Dalam kunjungan John Anderson pada tahun 1823, dalam bukunya yang berjudul "*Mission To East-Coast Of Sumatra*", wilayah Sumatera Timur yang ia kunjungi yaitu Kesultanan Deli, Serdang, Langkat, serta Kedatukan Sunggal. Ia juga mencatat mengenai kondisi geografis, etnografi, ekonomi, kebudayaan, potensi sumber daya alam, serta politik (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 46). Menurut (Pelzer, 1985) pada abad ke-17 M, Sumatera Timur menjadi wilayah perebutan dua kerajaan besar, yaitu Aceh dan Siak. Sumatera Timur terdapat kerajaan-kerajaan lokal, seperti Deli, Serdang, Langkat, Batubara, dan Asahan. Keduanya saling bergantian berdaulat atas kerajaan-kerajaan lokal tersebut.

Pihak asing turut dalam memperbutkan wilayah Sumatera Timur, seperti Inggris dan Belanda. Mereka bertujuan untuk mengambil keuntungan dari wilayah tersebut yang merupakan penghasil alam terbesar dan tempat yang paling strategis melakukan perdagangan. Maka, untuk merebut wilayah tersebut keduanya menggunakan strategi *divide et impera* atau politik adu domba kepada penguasa lokal.

C. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah peninjauan kembali buku buku atau jurnal jurnal yang terkait dan berfungsi di antaranya untuk mengetahui manfaat dan melengkapi penelitian sebelumnya, menghindari plagiasi dan memberikan masalah penelitian. Sepengetahuan penulis, pembahasan mengenai Kontestasi Politik Politik Antara Deli dan Serdang Tahun 1800-1865 belum ada yang membahas. pembahasan yang lebih rinci atau detail belum ada. Penelitian ini merupakan melengkapi dari karya karya yang sudah ada yang membahas tentang Sejarah Kesultanan Serdang. Ada beberapa yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini, antara lain :

Rujukan pertama, buku berjudul *Sari Sejarah Serdang I* yang ditulis oleh Tengku Luckman Sinar, diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Buku ini membahas bagaimana sejarah Sumatera Timur dari masa pra-aksara sampai masa kedatangan kolonial Belanda. Buku ini juga membahas tentang kerajaan Aru sebagai kerajaan pertama di Sumatera Timur, hancurnya kerajaa Aru dan munculnya Kerajaa Deli yang didirikan oleh Gocah Pahlawan, pertikaian antara Aceh dan Siak dalam berebut pengaruh di pantai timur Sumatera.

Rujukan kedua, buku berjudul *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut* yang di tulis oleh Daniel Perret diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia yang bekerja sama dengan *Ecole francaise d'Extreme-Orient* yang merupakan pusat penelitian dan pengembangan arkeologi nasioanl. Dalam bukunya, penulis menggunakan metode sejarah dan menjelaskan secara teliti keadaan mengenai wilayah yang ada di pesisir timur laut Sumatera, dari mulai letak geografis sampai etnis-etnis asli wilayah tersebut.

Rujukan ketiga, buku berjudul *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19* yang ditulis oleh Anthony Reid dan diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia (YOI). Buku ini menjelaskan tentang sejarah kerajaan Aceh dalam usaha merebut pengaruhnya di Sumatera Timur. Namun, disini Aceh harus berhadapan dengan kerajaan Siak dalam berebut pengaruh di Sumatera Timur. Belanda dan Inggris memiliki peran dalam membuat intrik politik terhadap dua kerajaan lokal tersebut, yaitu dengan menggunakan politik *divide et impera* (politik adu domba).

Rujukan keempat, buku berjudul *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah* yang ditulis oleh Ichwan Azhari dan diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Buku ini banyak membahas mengenai awal mula berdirinya Kesultanan Serdang di Sumatera Timur. Kemudian, penulis juga mengambil Kesultanan Serdang dari sudut pandang politik, pendidikan, persebaran agama, sosial. Namun, hal yang paling ditonjolkan adalah pengaruh ketokohan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah.

Rujukan kelima, buku berjudul *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* yang ditulis oleh Tengku Luckman Sinar dan diterbitkan oleh Yayasan Kesultanan Serdang. Buku ini membahas dengan menggunakan reportase (pemberitaan) secara lengkap mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera Timur. Mulai dari masa pra-aksara, sejarah mengenai Kerajaan Aru, runtuhnya Kerajaan Aru sampai berdirinya Kerajaan Deli, terpecahnya kerajaan Deli dan Serdang, dan dampak politik Belanda terhadap kerajaan yang ada di Pantai Timur Sumatera.

Rujukan keenam, karya Muhammad Takari berjudul *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*, merupakan salah satu rujukan buku yang membahas tentang awal mula berdirinya Kesultanan Deli di bekas wilayah Kerajaan Aru. buku ini juga membahas mengenai beberapa perodesasi Kesultanan Deli yang dimulai dari Tuanku Gocah Pahlawan sampai Sultan Mahmud Arya

Lamanjiji. Kemudian, buku ini membahas peradaban dan kebudayaan melayu, serta eksistensi peradaban Melayu Deli sampai saat ini.

Rujukan ketujuh, Skripsi Mastingah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 berjudul “Sekitar Perjanjian Giyanti 1755 M (Pecahnya Menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta)”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan landasan teori konfliknya Ralf Dahrendorf serta teknik menganalisis dari perpecahan Mataram Islam, yaitu antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis menggunakan model acuan tulisan skripsi ini pada perpecahan di dalam kubu Kesultanan Deli sehingga melahirkan Kesultanan Serdang.

Dari beberapa rujukan tersebut, penulis mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang belum diangkat terkait perpecahan di Kesultanan Deli serta kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang. Sehingga akan muncul beberapa kemungkinan atau asumsi lain. Belum ada penelitian yang membahas khusus mengenai kontestasi Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur tahun 1800-1865. Dengan demikian, penelitian ini penulis maksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode adalah suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Metode itu bersifat lebih praktis karena memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur, atau teknik pelaksanaannya secara sistematis. Sementara, metode sejarah didefinisikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan aturan-aturan ilmu sejarah (Daliman, 2012, p. 27).

Dalam menerapkan metodologi sejarah untuk menjelaskan suatu peristiwa, maka harus dikaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya. Penjelasan itu tentunya harus diadakan analisis terlebih dahulu mengenai faktor-faktor kausalitasnya, kondisional dan kontekstual. Hal yang menjadi penting dalam membuat analisis sejarah, yaitu menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori. Ini nantinya akan dipakai untuk membuat analisis tersebut. Metodologi dalam studi sejarah menggunakan berbagai alat analisis dari ilmu-ilmu sosial, diantaranya sosiologi, antropologi, politikologi, dan sebagainya (Kartodirjo, 1992, pp. 1–4).

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah, antara lain :

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik merupakan kegiatan dalam menemukan sumber-sumber sejarah. Menurut istilah, heuristik merupakan suatu seni, bukan suatu ilmu. Sumber-sumber sejarah ini tidak hanya didapatkan di perpustakaan, melainkan bisa didapat pada koleksi swasta atau perorangan (Abdurrahman, 2019). Beberapa hal yang sudah peneliti lakukan ketika mencari sumber sejarah, yaitu:

- a. Mengunjungi Taman Baca Tengku Luckman Sinar, beberapa sumber sejarah yang peneliti dapatkan, yaitu (1) *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*, (2) *Sari Sejarah Serdang Jilid 1*, (2) *Sari Sejarah Serdang Jilid 2*, (3) *Adat Raja-Raja Melayu Sumatera Timur dan Masalah Status Kerajaan*, (4) *Tak Hilang Melayu di Bumi*, (5) *Mahkota Adat dan Budaya Melayu Serdang*, (6) *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*, (7) *Kisah dan Peristiwa yang Berkaitan Dengan Sejarah Negeri Serdang*, (8) *Hikayat Deli*.
- b. Mengunjungi Yayasan Kesultanan Ma'moen al-Rasyid. Adapun sumber yang peneliti dapat, yaitu: (1) *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*.
- c. Mengunjungi perpustakaan pribadi Usman Pelly. Peneliti hanya mendapatkan sumber, yaitu: (1) *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang*.
- d. Mengunjungi Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed). Namun, peneliti tidak mendapatkan hasil data tambahan.
- e. Mengunjungi Perpustakaan Kita Baca. Peneliti mendapatkan beberapa sumber, diantaranya (1) *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur*, (2) *Menjinakkan Sang Kuli*, (3) *Aceh Sepanjang Abad*, (4) *Tuan Kebun dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*, (5) *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*.
- f. Koleksi buku pribadi. Peneliti memiliki beberapa buku pribadi yang menjadi pendukung data tambahan, diantaranya: (1) *Sejarah Batak*, (2) *Asal Mula Konflik Aceh*, (3) *Metodologi Sejarah*.
- g. Naskah dan catatan sejarah Kesultanan Deli dan Serdang. Beberapa sumber arsip mengenai Kesultanan Serdang yang peneliti dapatkan selama penelitian adalah: *Acte van Erkenning* dan *Mission to East-Coast of Sumatera*, yang diberikan oleh Ibu Tengku Mira Sinar. Sedangkan untuk naskah *Acte van Erkenning* dari Kesultanan Deli, peneliti dapatkan melalui akses Delpher.nl.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Sangat tidak mungkin bagi peneliti untuk mengobservasi secara langsung peristiwa sejarah yang sudah terjadi. Maka, perlunya kegiatan verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah untuk menghindari bias atau berat sebelah. Kegiatan verifikasi (kritik sumber) sangat penting bagi penelitian, karena sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan dari informan harus diuji terlebih dahulu validitas dan realibilitasnya. Sehingga akan terungkap fakta-fakta sejarah yang sebenarnya. (Daliman, 2012, p. 66).

Dalam tahap ini, peneliti mendapatkan sumber sejarah mengenai Kesultanan Deli dan Serdang dari beberapa informan, seperti Ibu Tengku Mira Sinar, Bapak Tengku Moharsyah dan Bapak Dr. Suprayitno, M. Hum. Sumber-sumber yang peneliti kumpul akan dianalisa kembali sehingga mendapatkan gambaran mengenai kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur tahun 1800-1865 M.

Beberapa dokumen berhasil peneliti dapatkan dari Ibu Tengku Mira Sinar melalui koleksi buku-buku pribadi atau pun naskah-naskah pribadi yang disimpan di perpustakaan Tengku Luckman Sinar. Peneliti mendapatkan dari koleksi pribadi Ibu Tengku Mira Sinar, yaitu naskah *Acte van Erkennung* yang merupakan naskah tertulis mengenai pernyataan bahwa Kesultanan Serdang mengaku tunduk kepada Kesultanan Siak dan Residen Belanda di Riau. Melalui kritik intern (keaslian sumber), peneliti telah melakukan penyelidikan mengenai pencatatnya, yaitu Residen Elisa Netscher pada tahun 1862 M.

Sumber primer lainnya peneliti dapatkan dengan mengunjungi situs *web* Delpher.nl. peneliti menemukan *Acte van Erkennung* milik Kesultanan Deli yang isinya merupakan pernyataan bahwa Deli tunduk kepada Kesultanan Siak dan Residen Belanda di Riau. Naskah ini tidak ada di Yayasan Ma'moen al-Rasyid, dikarenakan naska-naskah tersebut telah terbakar pada peristiwa revolusi sosial di tahun 1946 M.

Peneliti memiliki beberapa buku yang digunakan sebagai sumber, diantaranya buku Tengku Luckman Sinar yang berjudul *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* dan *Sari Sejarah Serdang Jilid 1&2*, buku ini banyak memberikan informasi mengenai sejarah mulanya Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur. Selain itu, buku ini juga menceritakan bagaimana terjadinya perpecahan dalam Kesultanan Deli sehingga melahirkan Kesultanan Serdang. Buku selanjutnya yang menjadi sumber peneliti adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Takari yang berjudul *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*, buku ini hanya membahas mengenai sejarah awal dan perkembangan Kesultanan Deli yang ada di Sumatera Timur.

Peneliti juga mendapatkan buku tambahan, yaitu buku yang ditulis oleh Usman Pelly yang berjudul *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang*, buku ini banyak menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang dan stratifikasi sosial (lapisan masyarakat) yang ada kesultanan melayu Sumatera Timur. Kemudian, *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur* yang ditulis oleh Daniel Perret. Buku ini banyak membahas ruang politik kesultanan yang ada di Sumatera Timur, khususnya Deli dan Serdang. Tidak hanya itu, buku ini juga banyak menggunakan hasil analisis sehingga peneliti mencoba untuk mempelajari teknik analisisnya.

3. Interpretasi

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Walaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

4. Historiografi

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah (metode sejarah) adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi tulisan

sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Sosial politik

Dalam karya-karya sejarah banyak kita temui kisah-kisah yang identik dengan peristiwa politik, perang, diplomasi, dan tokoh-tokoh politik. Pada abad modern saat ini, masih dijumpai beberapa kepemimpinan tradisional yang masih eksis, contohnya adalah keraton Jawa. Menurut Max Weber, klasifikasi kepemimpinan secara umum dapat dibedakan, diantaranya (1) otoritas karismatik, yang berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; (2) otoritas tradisional, yang dimiliki berdasarkan pewarisan; (3) otoritas legal-rasional, yang berdasarkan jabatan dan kemampuannya (Abdurrahman, 2019, pp. 18–19).

Otoritas tradisional merupakan sistem yang berdasarkan atas faktor genetika atau silsilah. Seseorang bisa menjadi penguasa bukan dari perjuangan yang dilakukannya. Melainkan diberikan kepada putra mahkota dengan memakai sistem dinasti (diwariskan secara turun-temurun). Tetapi, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu apabila seorang putra mahkota tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kekuasaan. Maka, orang yang berada di luar dari genealogi pasti akan mengambil alih kekuasaan, contoh yang dilakukan adalah kudeta (Priyadi, 2020).

Dalam konteks Kesultanan Melayu, Sultan merupakan salah satu pemimpin yang termasuk dalam klasifikasi otoritas-tradisional. Dimana dalam proses pergantian pemimpin selanjutnya, dipilihlah seorang putra mahkota yang akan menggantikan ayahnya. Maka, ketika Sultan Deli ke III, yaitu Tuanku Panglima Paderap memiliki empat orang putra yang masing-masing memiliki keinginan untuk menggantikan ayahnya. Akhirnya terjadi perpecahan dalam internal Kesultanan Deli, antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar

Junjungan, sehingga Tuanku Umar memisahkan diri dan membentuk sistem pemerintahan, wilayah dan kedaulatan sendiri yang bernama Kesultanan Serdang.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan data dan judul penelitian ini maka yang menjadi lokasi penelitian adalah : wilayah administrasi Kota Medan yang memiliki pengaruh Kesultanan Deli serta Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang memiliki pengaruh dari Kesultanan Serdang. Dengan waktu penelitian : Januari sampai April tahun 2020

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer

Untuk mendapatkan sumber primer, peneliti mengunjungi situs resmi baik lokal maupun internasional guna mencari arsip mengenai sejarah Kesultanan Deli dan Serdang, serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan yang terjadi pada tahun 1800-1865. Peneliti sudah mengunjungi beberapa tempat yang berkaitan dengan Kesultanan Deli dan Serdang, seperti Perpustakaan Luckman Sinar, serta Yayasan Kesultanan Ma'moen al-Rasyid. Selain itu, peneliti sudah mengakses digital collection dari KITLV yang terhubung langsung dengan Universiteit Leiden, Belanda. Situs lainnya berupa National Archives, Tropen Museum, Delpher.nl, dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Peneliti telah mendapatkan beberapa sumber yang valid mengenai Kesultanan Deli dan Serdang pada tahun 1800-1865. Karena lembaga-lembaga ini merupakan wadah resmi bagi suku melayu di Sumatera Utara.

Dalam mengakses sumber primer tersebut, peneliti mengurus surat izin ke UINSU. Kemudian, surat tersebut diberikan kepada informan kunci yang memiliki arsip atau dokumen mengenai Kesultanan Deli dan Serdang. Peneliti juga memperoleh sumber primer dengan melakukan wawancara ke beberapa informan kunci.

Tabel 1. Data Informan Kunci Sumber Primer

No.	Nama	Keterangan
1.	Dr. Suprayitno, M. Hum	Peneliti dan Sejarawan Unimed
2.	Tengku Mira Sinar	Kepala Taman Baca Luckman Sinar
3.	Tengku Moharsyah	Tourguide Istana Maimun

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pendukung dari hasil penelitian. penulis akan mengunjungi beberapa perpustakaan. Seperti, Perpustakaan UINSU, Digital Library UNIMED, Pussis-Unimed, Perpustakaan dan Arisp daerah Provinsi Sumut, serta tempat lainnya guna mengumpulkan sumber yang terkait. Penulis juga akan mengunjungi beberapa toko buku yang ada disekitaran Kota Medan serta toko buku online, guna memperkaya perbendaharaan sumber penulis. Selain itu, penulis juga akan mengumpulkan sumber dari koleksi pribadi dan mencari di media-media online artikel tentang sumber yang relevan dengan penelitian penulis.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri artinya peneliti sekaligus perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelopor hasil penelitian. Dalam memperkuat penelitian dan menjaring data-data, peneliti menggunakan alat bantu yang memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu beberapa pertanyaan

lewat wawancara guna melengkapi data yang dibutuhkan. Peneliti juga mempersiapkan beberapa alat perekam untuk merekam wawancara, alat tulis, dan kamera untuk mengambil gambar sebagai pelengkap data penelitian. Adapun alat serta instrument yang peneliti gunakan, diantaranya:

1. Wawancara dengan Tengku Mira Sinar, selaku keturunan dari Kesultanan Serdang.
2. Wawancara dengan Tengku Moharsyah, selaku tourguide istana maimun yang berkerabat dengan Sultan Deli.
3. Wawancara dengan Dr. Suprayitno, selaku sejarawan dan akademisi yang ahli dibidang Kesultanan yang ada di Sumatera Timur, khususnya Kesultanan Deli dan Serdang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan yang diperoleh dari:

1. Wawancara, dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang sejarah Kesultanan Deli dan Serdang. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara lisan atau tulisan dari para informan, yaitu Ibu Tengku Mira Sinar, selaku keturunan dari pihak Kesultanan Serdang, Bapak Tengku Moharsyah, selaku *tourguide* Istana Maimun yang memiliki hubungan kerabat dengan Sultan Deli, dan Bapak Dr. Suprayitno, M. Hum, selaku sejarawan yang fokus pada Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur.

F. Metode Analisis Penelitian

Dalam menggunakan metode analisis penelitian, terdapat dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus, sedangkan metode induktif merupakan pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum. Peneliti menggunakan metode analisis deduktif pada penelitian ini. Dimana secara umum Kesultanan Deli dan Serdang termasuk bagian dari kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Namun, pembahasan secara khusus,

yaitu ketika Kesultanan Serdang berdiri, terdapat bentuk kontestasi politik, diantaranya perebutan suksesi kepemimpinan, wilayah, dan ekonomi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Politik-Pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang

Menurut Reid, kesultanan-kesultanan Melayu yang ada di Sumatera mengambil bentuk dari kerajaan-kerajaan besar Islam pada abad ke-16 dan ke-17. Aturan dan hukum yang dijalankan oleh pihak kesultanan adalah kesetiaan mutlak pada raja yang dibebankan kepada rakyat, jika tidak dipatuhi atau durhaka maka pembalasan Tuhan pasti akan turun. Namun, hanya sebagian sultan Melayu yang memperhatikan urusan pemerintahan sehari-hari. Kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur mengambil bentuk dari campuran berbagai etnik, seperti unsur Batak, Minangkabau, Aceh dan India daripada dari Malaka dan Johor. Hal ini juga bisa dilihat pada Kesultanan Deli dan Serdang (Reid, 2012, p. 2).

Kesultanan Melayu di Sumatera Timur mengadopsi beberapa sistem pemerintahan dari Kesultanan Aceh yang mencontoh Khilafah Islam. Dalam hal ini, Kerajaan Aceh mengikut beberapa sistem pemerintahan dari Daulah Abbasiyah, yaitu kepala pemerintahan atau kepala badan eksekutif yang dipegang langsung oleh sultan dan dibantu oleh beberapa wazir, seperti *Wazir as-Siyasah* (bidang politik), *Wazir Harb* (bidang keamanan/pertahanan), *Wazir Maktabah* (bidang administrasi negara), *Wazir al-Iqtishad* (bidang ekonomi/keuangan), *Wazir al-Hukkam* (bidang kehakiman) (Supriyadi, 2008, p. 194).

Perkembangan peradaban Kesultanan Melayu Sumatera Timur dipengaruhi oleh pemikiran Islam. Maka dari itu, terjadi integrasi antara keduanya dengan melahirkan sebuah slogan “Dunia Melayu Dunia Islam” atau “Tak Islam Tak Melayu” (pepatah ini memiliki arti bahwa etnis Melayu berkaitan erat dengan Islam). Selain itu, Kesultanan Melayu Sumatera Timur memiliki sebuah ungkapan yaitu “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” (istilah ini memiliki arti bahwa adat melayu melekat dengan kebudayaan Islam yang berdasarkan atas Al-

Quran dan as-Sunnah) yang dijalankan dalam sistem pemerintahannya (Mugiyono, 2016).

Dalam *Hikayat Deli*, Kesultanan Deli berada di bawah Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ia mengirim utusan yang merupakan seorang panglima besar dalam strategi penaklukan perang Aceh bernama Muhammad Dalik atau Gocah Pahlawan ke wilayah Percut (sekarang wilayahnya berada di pesisir dekat Medan). Beberapa tahun kemudian ia mulai menetap di Gunungkelaus (di hulu Deli Tua) (Perret, 2010a, p. 130).

Saat Gocah Pahlawan dilantik, ia mengucapkan salah satu sumpah yaitu ‘memperkuat agama dan dakwah Islam serta memperluas dalam segala bidang yang berpedoman kepada: Aceh Serambi Mekah, Deli serambi Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda meninggal, Aceh dilanda krisis kepemimpinan dan kemunduran karena tampuk kesultanan dilanjutkan oleh wanita. Dalam ajaran Islam pemimpin itu harus laki-laki. Maka, timbul spekulasi tepatkah perempuan menjadi seorang pemimpin/imam. Oleh karena itu Deli mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh, namun Aceh mengirim beberapa armadanya untuk meminta ketegasan Gocah Pahlawan. Deli tidak bisa berbuat banyak selain mengikrarkan kembali kesetiaannya. Pada masa Tuanku Panglima Perunggit, Deli berusaha memerdekakan diri dari Aceh, tetapi usaha itu tidak berhasil sepenuhnya, maka ditetapkan bahwa Deli merupakan kerajaan yang berotonomi penuh namun masih dibawah perlindungan Aceh (Usman; dkk Pelly, 2019, p. 482).

Sistem kekuasaan dalam tradisi melayu diberikan kepada seorang bangsawan yang dipercaya secara turun-temurun dengan wilayah kekuasaan tertentu. Akan tetapi jika seorang bangsawan keluar dari norma-norma kebudayaan yang sudah ditetapkan, maka ia bisa dikritik bahkan diturunkan dari kekuasaannya. Hal ini dikemukakan pada pepatah melayu “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah”. Kesultanan Melayu memiliki tingkatan kekuasaan adalah dari Allah, kemudian turun ke negara, raja, pimpinan, rakyat, keluarga, dan keturunannya.

Kesultanan di Sumatera Timur dalam pemerintahannya menerapkan stratifikasi sosial (pelapisan masyarakat). Pembentukan pelapisan masyarakat melayu sebenarnya sudah terbentuk di masa pra kolonial, pembentukan lapisan ini menjadi lebih kompleks saat kegiatan perkebunan dan perdagangan asing mulai ramai di Sumatera Timur. Menurut keterangan, orang Melayu menggolongkan masyarakat yang terdiri dari 2 bagian, yaitu: golongan bangsawan dan golongan rakyat. Golongan bangsawan sendiri memiliki beberapa tingkatan dari segi martabat, jarak sosial, dan hubungan kekerabatan (genealogis). Seperti Tengku, Wan, Datuk, Raja, Orang Kaya, dan Encik/Tuan (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986).

Ada beberapa pengelompokan dalam bangsawan di Kesultanan Melayu Sumatera Timur, diantaranya adalah:

- a. Tengku, adalah seorang pemimpin atau guru yang mampu menguasai bidang agama, akhlak, dan adat istiadat. Menurut Tengku Lah Husni, istilah Tengku resmi digunakan karena mengadopsi dari Kerajaan Siak di tahun 1857. Jika dilihat dari konteks kebangsawanan, seseorang bisa memakai gelar Tengku yaitu apabila ayahnya bergelar Tengku dan ibunya juga bergelar Tengku. Namun, seseorang juga bisa bergelar Tengku apabila ibunya bukan Tengku. Maka dari itu, gelar Tengku diwariskan dari keturunan ayah.
- b. Sayyid, adalah seseorang yang memiliki keturunan Arab dan diyakini sebagai zuriyatnya Nabi Muhammad S.A.W. Biasanya gelar ini dipakai di wilayah Riau dan Semenanjung Malaya.
- c. Raja, merupakan gelar yang diambil dari Siak atau seseorang yang memiliki gelar bangsawan dari daerah Labuhan Batu, seperti Bilah, Panai, dan Kota Pinang. Biasanya gelar kebangsawanan ini diberikan kepada mereka yang memiliki wilayah pemerintahan hukum yang luas atau seorang pemimpin di sebuah kampung kecil.

- d. Wan, adalah seseorang yang memiliki garis keturunan ibu bergelar Tengku dan dari ayah yang memiliki garis keturunan bangsawan lain atau bisa dari masyarakat biasa.
- e. Datuk, gelar kebangsawanan ini berasal dari Kesultanan Aceh. Gelar ini diberikan kepada seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan otonomi di wilayah kedatuan atau kejeruan. Seorang datuk yang memiliki anak laki-laki dapat menyanggah gelar datuk. Sultan juga bisa memberikan gelar datuk kepada seseorang yang dianggap telah berjasa untuk Kesultanan atau bangsanya. Datuk memiliki beberapa tingkatan yaitu datuk seri dan datuk wira.
- f. Kaja, diberikan kepada anak-anak wanita seorang datuk.
- g. Encik dan Tuan, merupakan gelar penghormatan yang diberikan kepada seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dalam berbagai bidang, seperti kesenian, dagang, bahasa, dagang, agama, dan lainnya. Panggilan ini bisa diucapkan oleh sultan, raja, bangsawan, maupun masyarakat pada umumnya (Takari, 2012, pp. 155–156).

Kesultanan Melayu di Sumatera Timur umumnya banyak mengadopsi dari Kerajaan Hindu. Seperti halnya terlihat pada pemakaian kata-kata istilah dan sistem pemerintahan. Misalnya pada nama-nama yang dipakai, seperti mangkat berarti meninggal dunia, kurnia berarti pemberian, anugerah berarti hadiah, titah berarti perintah. Kemudian dalam segi pemerintahan, pihak kesultanan sering mengangkat orang-orang besar sebanyak 4, 8, 16 sampai 32 orang. Seperti yang telah dikemukakan oleh pihak Kesultanan Serdang, perhitungan ini disebabkan karena pengaruh agama Hindu berdasarkan ilmu astrologi (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986).

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kesultanan yang ada di Sumatera Timur membagi dalam dua kawasan kultural yaitu wilayah melayu pesisir dan wilayah pedalaman/pegunungan yang dihuni oleh etnis Karo/Batak. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan didampingi oleh para pembesarnya yaitu para

Orang Besar. Pada posisi puncak kekuasaan ditempati oleh sultan, dibawahnya terdapat Datuk 4 suku yang merupakan dewan menteri. Posisi Dewan Kerajaan diisi oleh Dewan Menteri dan Wakil Sultan/Raja Muda yang dipimpin oleh Sultan. Untuk posisi perdana menteri diangkat salah satu dari Datuk/Wazir/Pangeran berempat tadi, dengan gelar Bendahara Paduka Sri Maharaja untuk sebutan di Deli dan Datuk Paduka Setia Raja untuk sebutan Serdang. Kemudian posisi Orang Besar yang diberi gelar Tumenggung, terbagi dalam jaksa/kepala polisi yang bertugas mendirikan penjara dan menangkap penjahat, syahbandar yang bertugas mengutip bea cukai di pelabuhan dan urusan administrasi dengan pihak luar, laksamana sebagai panglima angkatan laut, panglima darat sebagai panglima angkatan darat, mufti/imam paduka tuan sebagai pengurus masalah agama (Usman; dkk Pelly, 2019, p. 492).

Ada perbedaan Orang Besar pada Kesultanan Deli dan Serdang, pada Kesultanan Deli terdapat Datuk 4 Suku sedangkan Serdang terdapat Wazir Berempat. Menurut sejarahnya, Datuk 4 Suku berawal ketika Gocah Pahlawan menjadi penguasa Deli yang masih berada di bawah pengaruh Aceh, ia menikah dengan adik Raja Sunggal bernama Puteri Nang Baluan tahun 1632 M. Perkawinan ini mengakibatkan ia diakui oleh raja-raja Batak seperti, Sunggal, XII Kuta Hamparan Perak dan Sukapiring sebagai hakim perdamaian (Sangti, 1997). Wilayah dari masing-masing suku yang biasa disebut *urung* di Deli adalah Sepuluh Dua Kuta Hamparan Perak, Sukapiring, Senembah, dan Sunggal. Dari keempat *urung* ini, Sunggal mempunyai pengaruh kuat. Gocah Pahlawan menghindari terjadinya perang dengan mereka, maka mereka diangkat menjadi Datuk yang memiliki fungsi sebagai menteri mendampingi Sultan (Usman; dkk Pelly, 2019).

Perret mengutip dari *Riwayat Hamparan Perak* mendapatkan beberapa bukti bahwa nenek moyang para datuk dan *kejuruan* berasal dari pedalaman, diceritakan bahwa mereka ini merupakan orang Islam dan memiliki hubungan dengan Aceh. Datuk Hamparan perak memiliki silsilah yang berawal dari Guru Patimpus yang memiliki dua anak, yaitu Hafiz Muda dan Hafiz Tua. Lalu,

keturunan Hafiz muda yang kelima bernama Sutan Amad menjadi datuk pertama di Hampan Perak (Perret, 2010a, p. 140).

Mengenai silsilah keturunan kedatukan Sunggal yaitu berasal dari seorang Karo yang bernama Sesser. Salah satu dari keturunannya yang bernama Adir mulai memeluk agama Islam berkat Raja Deli Muhammad Dalik. Kemudian, anaknya bernama Datuk Hitam diangkat sebagai Datuk Sunggal yang merupakan salah satu Datuk 4 suku dari Kesultanan Deli. Hal ini dikarenakan saudara perempuannya bernama Nang Baluan menikah dengan Gocah Pahlawan (Tuanku Luckman Sinar, 1971). Kedatukan Sunggal memiliki peran penting yaitu sebagai “Ulon Janji” (pembacaan surat perjanjian pengangkatan Sultan) baik itu di Kesultanan Deli dan Serdang.

Para datuk memiliki peran penting dalam bidang peradilan. Datuk-datuk tersebut berkeliling wilayah untuk menjatuhkan keputusan. Untuk masalah-masalah kecil akan ditangani oleh datuk sedangkan untuk masalah pembunuhan dan peracunan yang terjadi di daerah dusun maka masalah tersebut akan dihadapkan langsung kepada sultan. Daerah-daerah dusun yang berada dibawah Kesultanan Melayu baik itu di pesisir maupun di pedalaman tetap mengakui adanya pengawasan oleh para *datuk*.

Datuk Sukapiring memiliki silsilah yang sama dengan kedatukan Hampan Perak.

Ada beberapa syarat-syarat menurut adat melayu terhadap kriteria datuk:

- a. Sebagai seorang datuk, ia bagaikan kayu besar ditengah padang karena bisa menjadi tempat berteduh di hari hujan, tempat bernaung di hari panas, dan batangnya menjadi tempat bersandar.
- b. Seorang datuk harus kaya, dalam artian bukan kaya karena emas, namun kaya karena adat pusaka dan undang-undang terdahulu
- c. Dalam menjalankan musyawarah, datuk dilarang marah, menggeretak, menyingsing lengan baju, atau keluar tanpa izin.

- d. Datuk berada di pintu adat, malim di pintu agama, pegawai dipintu susah, hulubalang di pintu mati.
- e. Kata Raja melimpahkan, kata Datuk menyelesaikan, kata malim kata hakikat, kata menteri kata berutang, kata hulubalang kata mengeras, kata banyak kata bercampur, adat diatas tumbuh, pusaka diatas tempat.

Kesultanan Serdang memiliki empat wazir yang mendampingi sultan dalam pemerintahannya. Keempat wazir ini membantu Kesultanan Serdang untuk meluaskan wilayah kekuasaannya dari Sampali sampai Sungai Serdang. Mereka juga bertindak sebagai kawan sultan dalam bermusyawarah untuk hubungan-hubungan politik. Wazir berempat itu diantaranya sebagai berikut:

1. Datuk Paduka Maha Menteri yang menjadi wakil sultan untuk daerah Araskabu atau Kepala distrik Kampung Besar.
2. Tengku Seri Maharaja yang menjadi wakil sultan untuk daerah Kampung Durian atau Kepala distrik Ramunia.
3. Datuk Paduka Raja yang menjadi wakil sultan untuk daerah Batang Kuis atau Kepala distrik Kampung Baru.
4. Tengku Bendahara Paduka Raja yang menjadi wakil sultan untuk daerah Lubuk Pakam atau Kepala distrik Lubuk Pakam.

Para Orang Besar juga memiliki fungsi sebagai kepala daerah di bawah kekuasaan sultan. Sebagian lain Orang Besar itu diantaranya Bentara Kiri yang bertindak sebagai ajudan sultan dan Bentara Kanan yang bertindak sebagai penghulu istana dan penghulu orang-orang Bangsawan, mereka juga disebut "Bentara Dalam" dan "Bentara Luar". Adapun selaku Bendahara Paduka Seri Maharaja itu adalah wazir berempat dalam Kesultanan Serdang yang bertugas sebagai kepala pemerintah harian. Asal kata bendahara sendiri diyakini dari perbendaharaan segala rahasia sultan dan memberi kebajikan bagi bumi yang dilingkari sultan. Kemudian setiap Orang Besar berempat memiliki menteri-menteri bawahan, diantaranya:

1. Bendahara Paduka Seri Maharaja,

2. Seri Maharaja,
3. Paduka Mahamenteri,
4. Paduka Raja (Tengku Luckman Sinar, n.d.).

Selain itu, bendahara memiliki peran penting di pemerintahan Kesultanan Melayu, seperti mengurus beberapa perjanjian-perjanjian, penobatan raja baru, pemakzulan raja zalim atau cacat, serta menentukan perang atau perdamaian dan hal-hal lainnya. Para wazir harus tetap mendampingi sultan dalam proses musyawarah. Mereka ini termasuk sebagai perwakilan dari rakyat.

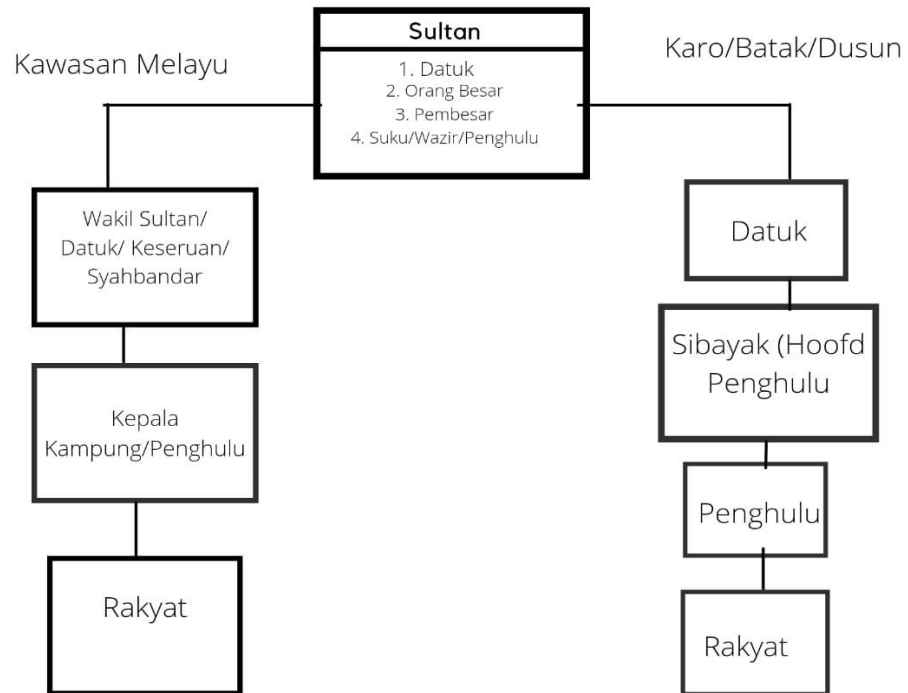
Kemudian pada Kesultanan Serdang terdapat 4 orang Raja Muda, yaitu Pangeran Sabjana, Pangeran Raja Muda Sri Diraja Mohd. Thakir, Raja Muda Sri Maharaja Tan Aman dan Raja Muda Mustafa. Sedangkan Deli memiliki Raja Muda yaitu Sultan Osman sewaktu ayahnya masih hidup. Peran Raja Muda juga menentukan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur, khususnya Deli dan Serdang. Diantara beberapa fungsi Raja Muda, yaitu:

- a. Mengambil keputusan atas nama Sultan mengenai segala urusan di wilayah Batak Dusun, jika wakil Sultan di Batak Timur atau Kejeruan Senembah tidak bisa menyelesaikannya.
- b. Sebagai kepala kantor dan kepala polisi-polisi Sultan.
- c. Pejabat ketua kerapatan.
- d. Sebagai hakim tunggal dalam urusan perkara-perkara yang tidak begitu penting.
- e. Kepala peradilan mengenai keturunan-keturunan Sultan atau Orang-orang Besar.

Kedudukan Sultan sebagai ulil amri memiliki otoritas dalam membentuk para qadhi dengan tujuan untuk menjalankan syariat Islam di masyarakat. Selain itu, sultan juga memilih imam dan nazir masjid kesultanan. Akan tetapi, posisi qadhi memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan imam dan nazir. Untuk masalah-masalah agama di tingkat desa ditangani oleh qadhi, pada tingkat

kerajaan sultan memberi gelar imam paduka tuan atau mufti kepadanya (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986).

Berikut struktur Pemerintahan di Kesultanan Deli dan Serdang



Gambar 1. Struktur Sistem Pemerintahan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur

Sumber: Usman Pelly “Tak Hilang Melayu di Bumi”

Pada wilayah pedalaman Sumatera Timur yaitu Batak Dusun, sultan mengutus wakilnya yang bergelar Sibayak. Gelar ini diperuntukkan bagi sejumlah pembesar di wilayah pedalaman Sumatera Timur secara turun-temurun. Kemudian, untuk pemimpin kampung disebut *perbapaan* dan setiap kampung dipimpin oleh seorang penghulu. *Luhak* merupakan sekelompok wilayah yang dipimpin langsung oleh *datuk* atau *kejeruan* maupun Orang Besar dari Kesultanan Deli dan Serdang.

Sinuan terbagi menjadi dua yaitu *sinuan bunga* dan *sinuan gambir*. *Sinuan* memiliki arti wilayah pertanian yang berada di dusun hulu dan hilir. *Sinuan bunga* merupakan wilayah yang banyak ditanam kapas, sedangkan *sinuan gambir* merupakan wilayah yang ditanam gambir. Kedua wilayah ini pernah terpisah,

namun atas prakarsa dari datuk maka dibuat dua persekutuan dengan masing-masing memiliki sebuah pengadilan. Dalam beberapa kasus, *perbapaan-perbapaan* menganggap wilayahnya tidak dibawah daulah Kesultanan Melayu. Tetapi, jika terjadi konflik mereka akan meminta bantuan kepada pihak kesultanan. Kedudukan sultan Deli dan serdang di mata para pemimpin pedalaman pengaruhnya tidak terlalu kuat dan disegani, maka terdapat sebuah semboyan di Kesultanan Sumatera Timur, yaitu “di Langkat, Raja menanti; di Serdang, Raja datang”. Salah satu penyebabnya adalah posisi raja sejajar dengan pemimpin-pemimpin pedalaman, maka raja harus menemui mereka (Perret, 2010a, p. 142).

Perihal lambang, antara Kesultanan Deli dan Serdang terdapat beberapa perbedaan. Lambang-lambang ini menjadi citra diri atau pun cita-cita peradaban serta kekuasaan di kedua kesultanan. Pada Kesultanan Deli, memiliki beberapa bentuk, tata letak, dan warna yang memiliki maknanya. Berikut ini merupakan lambang dari Kesultanan Deli:

- a. Mahkota dengan bintang di puncak, memiliki makna sebagai pemimpin karena Allah Subhanahu Wata'ala.
- b. Payung bertingkat tiga, memiliki makna bahwa Deli memiliki tingkatan perlindungan.
- c. Bendera/pataka, kain kuning dengan dua bintang emas, sudut atas diikat di sebatang tongkat agam. Lambang ini memiliki makna bahwa kesultanan mendapat ilham, terjaga dan bijaksana.
- d. Tombak berbambu, sebagai kawal utama luar (regalia/ tanda kerajaan).
- e. Pedang, sebagai kawal kedua (regalia/ tanda kerajaan).
- f. Keris, sebagai kawal yang terakhir atau ketiga (regalia/ tanda kerajaan).
- g. Susunan kapas, memiliki arti kemakmuran.
- h. Susunan daun tembakau, memiliki arti kejayaan (karena Kesultanan Deli pernah memiliki komoditas yang dikenal seantero dunia, yaitu tembakau Deli).
- i. Perisai dengan gambar petaratna, tongkat dan tepak, memiliki arti pimpinan hukum adat dan rakyat yang terjaga.

- j. Bintang besar dibawah perisai, memiliki arti bahwa Kesultanan Deli mendapat sinar petunjuk.
- k. Lima sayap ekor di bagian bawah, memiliki arti bahwa hukum islam sebagai landasan.
- l. Simetris, memiliki arti yaitu Kesultanan Deli harus adil dan tidak berat sebelah.
- m. Warna kuning memiliki arti tuah dan mulia, putih memiliki makna suci, warna hijau memiliki arti daya hidup.



Gambar 2. Lambang Kesultanan Deli
Sumber Muhammad Takari "Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya"



Gambar 3. Lambang Kesultanan Serdang
Sumber Kerajaan Nusantara.com

Kesultanan Serdang memiliki lambang dan makna yang berbeda dengan Deli. Hal ini terlihat pada gambar diatas, pada lambang Kesultanan Serdang

terdapat gambar bulan setengah bulatan yang menjadi cirri khas seperti kesultanan-kesultanan Islam lainnya. Tulisan *Al Watsiqu billah* menjadi moto yang memiliki arti bahwa Kesultanan Serdang berpegang teguh kepada tali Allah dan berlandaskan syariat Islam. Lambang tiga senjata dan satu payung memiliki makna wazir berempat, karena mencontohkan Nabi Muhammad yang memiliki empat sahabat sebagai penasihat, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib. Gambar-gambar manusia tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, maka diganti dengan motif daun-daun dan hewan (Azhari, 2013, pp. 59–61).

B. Perpecahan Antara Kesultanan Deli dan Serdang

Beberapa Kesultanan yang ada di Sumatera Timur, khususnya Kesultanan Deli dan Serdang, menerapkan sistem monarki, di mana esafet kepemimpinan dilanjutkan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Deli dan Serdang mengikuti model Kekhilafahan Islam. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan, misalnya saja Kesultanan Deli dan Serdang sudah menetapkan cara pemilihan putra mahkota. Kemudian, ada “Datuk 4 Suku” yang menengahi proses pergantian tersebut. Beberapa proses pengangkatan sultan selanjutnya telah tercatat di beberapa sumber.

Dalam proses pengangkatan sultan selanjutnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari darah ibu, yaitu:

1. Putera laki-laki Sultan yang ibunya merupakan seorang permaisuri (Gahara),
2. Putera laki-laki Sultan yang ibunya merupakan keturunan bangsawan tetapi tidak menjadi permaisuri,
3. Putera laki-laki sultan yang ibunya adalah istri namun tidak memiliki keturunan bangsawan.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak ada, maka dipilihlah syarat yang ketiga namun harus merupakan putera tertua. Tetapi, jika ada dari putera-puteranya dari syarat pertama dan kedua namun belum akil baligh maka putera dari syarat ketiga yang akan ditabalkan oleh Orang Besar sebagai “Bekal atau Pengganti

Sultan”. Namun jika seorang calon pengganti sultan belum dinobatkan oleh Orang Besar berempat, maka kekuasaannya bisa berpindah kepada saudara-saudaranya yang masih hidup dengan memperhatikan syarat-syarat sebelumnya maupun syarat tambahan seperti tingkah laku dan tidak cacat fisik.

Ketika proses pergantian seorang sultan, Orang-orang besar berkumpul untuk memilih penggantinya, calon sultan harus dilihat secara teliti. Sehingga ketika sultan telah meninggal, jenazahnya dibiarkan terlebih dahulu sampai mendapat calon pengganti sultan yang layak. Adat ini dinamakan “Raja mati, Raja menanam”, yang berarti dikubur atas perintah sultan yang baru dinobatkan. Menurut kebiasaan Kesultanan Melayu, putera tertua dari sultan dari istri bangsawan selalu diangkat menjadi Putera Mahkota. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan (Tengku Luckman Sinar, n.d.).

Tuanku Panglima Paderap memerintah dari tahun 1698 M dan wafat pada tahun 1728 M. Maka sebelum wafat, terjadi proses pemilihan dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi Sultan Deli selanjutnya. Pendapat ini didukung Dalam menentukan pengganti sultan, Deli memiliki sistem pemilihan melalui 4 Raja Urung atau yang disebut dengan “Datuk Empat Suku”, mereka adalah Raja Urung Sunggal, Raja Urung XII Kuta (Hampan Perak), Raja Urung Senembah, dan Raja Urung Suka Piring.

Seharusnya melalui peraturan ini setidaknya bisa meredam pertikaian pada internal Kesultanan Deli, tapi ada beberapa pihak yang memanfaatkannya. Sumber Serdang menyebutkan bahwa Tuanku Umar yang layak atas tahta Deli. Namun haknya direbut oleh Tuanku Panglima Pasutan, maka, terjadi perpecahan dalam kubu Kesultanan Deli yang tidak dapat dielakkan. Menurut analisis penulis, seharusnya Tuanku Panglima Paderap bisa mencegah terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh putra-putranya. Maka, terjadi *missink link* dalam proses pengangkatan Kesultanan Deli selanjutnya.

“Konflik internal yang terjadi di Kesultanan Deli kemudian melahirkan Kesultanan Serdang, karena keempat putra Tuanku panglima Paderap memiliki keinginan untuk berkuasa. Maka, terjadi perebutan kekuasaan antara

mereka hingga melahirkan Kesultanan Serdang. Lalu ketika Serdang mulai memisahkan diri dengan Deli, pertikaian antara kedua kesultanan ini terus berlanjut dengan beberapa poin penting yang perlu dicatat, yaitu perebutan suksesi, perluasan wilayah yang bertujuan untuk mendapat dukungan, sumber daya alam, dan perdagangan dengan tujuan ekonomi. Wilayah pesisir menjadi pusat aktivitas perdagangan dengan pihak luar dan komoditas yang paling menarik perhatian adalah lada” (wawancara dengan Suprayitno, 20 September 2021).

Diantara keempat putra Tuanku Panglima Paderap, adalah:

1. Tuanku Jalaludin, yang memiliki gelar Kejuruan Metar. Beliau merupakan keturunan dari bangsawan Mabar, Percut dan Tanjung Mulia.
2. Tuanku Sutan Panglima Gandar Wahid, yang memiliki gelar Panglima Pasutan. Ia merupakan keturunan dari bangsawan Deli dan Bedagai.
3. Tuanku Wahidin yang memiliki nama lain yaitu Tuanku Tawar, yang memiliki gelar Kejuruan Santun. Ia merupakan keturunan dari bangsawan Denai dan Serbajadi.
4. Tuanku Umar, yang memiliki gelar Kejuruan Junjungan (Arifin, 1987).

Tuanku Jalaludin merupakan anak tertua dari Tuanku Panglima Paderap, namun ia memiliki cacat jasmani sehingga tidak termasuk dalam calon pengganti. Sedangkan Panglima Pasutan merupakan anak kedua yang berhasrat mengambil alih kekuasaan. Namun menurut tradisi adat raja-raja melayu, penerus raja yang telah wafat harus seorang putra yang diambil dari permaisuri (putera gahara). Maka, Tuanku Umar merupakan anak dari Puan Sampali yang merupakan permaisuri dari Percut (Basarshah II, Tuanku Luckman Sinar; Sinar, Silvana; Sinar, Thyrhaya Sinar; Umry, 2007). Sebaliknya menurut silsilah garis keturunan (tarombo) dari Serdang, Tuanku Panglima Pasutan tidak termasuk putra dari permaisuri/gahara (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 39).

Pada pihak Mabar dan Percut tidak setuju dan sangat keberatan Panglima Pasutan menjadi Raja Deli. Tuanku Jalaluddin sebagai anak tertua juga menginginkan posisi menjadi Raja Deli menggantikan ayahnya (Arifin, 1987). Menurut adat karo, pengganti raja harus dari putera gahara walaupun masih dibawah umur tapi tetap sah. Namun, Datuk Urung XII Kuta dan Datuk Urung

Sukapiring lebih berpihak kepada Panglima Pasutan. Maka, secara sah yang menjadi Sultan Deli ke-IV adalah Tuanku Panglima Pasutan pada tahun 1728 M. Kemudian, Tuanku Umar dan ibunya diusir ke daerah Serdang. Untuk menghindari terjadinya perang saudara maka Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Tanjung Merawa, beserta utusan dari Sultan Aceh yaitu Kejuruan Lumu mengangkat dan menobatkan Tuanku Umar sebagai Raja Negeri Serdang yang pertama dengan pusat pemerintahan di muara sungai Serdang (Belumai) pada tahun 1723 M (Basarshah II, Tuanku Luckman Sinar; Sinar, Silvana; Sinar, Thyrhaya Sinar; Umry, 2007).

“Mengapa Datuk Urung XII Kuta dan Datuk Sukapiring memihak kepada Tuanku Panglima Pasutan dari Kesultanan Deli daripada Tuanku Umar dari pihak Kesultanan Serdang? bahwa lahan Datuk Hamparan Perak dan Datuk Sukapiring berada di tengah Kota Medan. Keduanya memprakarsai perpindahan ibu kota Deli dari Pulo Brayan ke Labuhan Deli. Oleh karena itu, Tuanku Panglima Pasutan memanfaatkan keberpihakan dari kedua kedatukan ini untuk kepentingan Kesultanan Deli” (wawancara dengan Tengku Mira 13 September 2021).

“Terjadinya perebutan mengenai siapa yang layak menjadi Sultan Deli ke-IV menggantikan Tuanku Panglima Paderap, mengerucut antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar. Maka, Datuk Empat Suku sama sekali tidak berpihak kepada keduanya. Apabila pihak kedatukan memihak, maka akan menjatuhkan eksistensi mereka. Oleh karena itu, dibentuk musyawarah dalam menentukan yang menghasilkan pengganti Tuanku Panglima Paderap sebagai pengganti ayahanda Tuanku Panglima Pasutan menjadi Sultan Deli ke-IV. Sementara, saudara-saudaranya diberikan hak kepemimpinan di beberapa wilayah. Namun Tuanku Umar merasa layak untuk menggantikan ayahandanya, maka beliau berlepas diri dari Kesultanan Deli” (wawancara dengan Tengku Moharsyah 17 September 2021).

Ketika Kesultanan Serdang telah berdiri dan berdaulat, maka posisi sultan memiliki beberapa peran penting, seperti menjadi *ulil amri*, sebagai kepala Adat Melayu, dan sebagai Pemerintahan Kerajaan Serdang. Beberapa daerah juga mulai tunduk kepada Kesultanan Serdang, seperti Denai (Tuanku Luckman Sinar, 2006, p. 55). Menurut Ichwan Azhari, masa Tuanku Umar sebagai Sultan Serdang yang pertama keadaan pemerintahannya belum stabil karena masih dilanda konflik (Azhari, 2013, p. 36). Meskipun Kesultanan Serdang telah memisahkan diri dari Deli, dengan tujuan untuk menghindari perang saudara, namun pertikaian antara

kedua kesultanan ini tetap berlanjut. Hal ini terlihat pada masing-masing kebijakan pada Sultan Deli dan Serdang. Berikut beberapa periodisasi Sultan Deli, yaitu:

1. Tuanku Panglima Pasutan (Sultan Deli ke- IV 1728-1761 M)

Tidak banyak buku yang membahas mengenai Tuanku Panglima Pasutan dari segi pemerintahan. Selama masa pemerintahannya, ia memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Deli dari Pulo Brayan ke Labuhan Deli. Tujuan dari kebijakan ini tidak hanya untuk mendapatkan sumber daya alam yang melimpah, tapi juga melihat sumber daya manusia sebagai pendukung jalannya pemerintahan (Nasution & Satria, 2017). Dalam kebijakan politik, ia semakin memperkokoh kedudukan datuk empat suku, diantaranya sebagai berikut:

- a. Daerah Sepuluh Dua Kuta yang mencakup daerah Hamparan Perak dan sekitarnya,
- b. Daerah Serbanyaman yang mencakup daerah Sunggal dan sekitarnya,
- c. Daerah Senembah yang mencakup daerah Patumbak, Tanjung Morawa dan sekitarnya,
- d. Daerah Sukapiring yang mencakup daerah Kampung Baru dan Kota Medan sekitarnya (Takari, 2012, pp. 76–77).

2. Tuanku Panglima Gandar Wahid (Sultan Deli ke-V 1761-1805)

Tuanku Panglima Gandar Wahid menjadi Sultan Deli ke-V menggantikan ayahnya yaitu Tuanku Panglima Pasutan. Beberapa sumber mengatakan bahwa Gandar Wahid merupakan gelar dari Tuanku Panglima Pasutan, namun pendapat ini telah dibantah. Dibawah kepemimpinan beliau kedudukan datuk empat suku semakin kokoh. Beliau tetap menjalankan pemerintahannya berdasarkan kanun Islam. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Deli menjadi negeri yang madani dan masyarakat mengalami kesejahteraan (Takari, 2012, p. 77). Beliau menerapkan beberapa kebijakan yaitu memindahkan pusat pemerintahan di daerah Kampung Labuhan Deli. Ini bertujuan untuk mengokohkan kekuasaannya di daerah tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga melakukan kegiatan perdagangan dengan menjual hasil bumi ke daerah lain (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

3. Sultan Amaluddin Mangedar Alam (Sultan Deli ke-VI 1805-1850)

Setelah Tuanku Panglima Gandar Wahid mangkat, maka Kesultanan Deli selanjutnya dipimpin oleh anaknya yang ketiga bernama Amaludin Mangedar Alam. Beliau dianugerahkan oleh Kerajaan Siak dengan gelar “sultan” pada tahun 1814 M. Dalam hal ini, pengaruh Aceh di Sumatera Timur mulai melemah. Namun bukan berarti Kesultanan Deli memutuskan hubungannya dengan Aceh, melainkan Deli tetap membangun hubungan politik dengan keduanya. Maka, ada ungkapan yang mengatakan “beraja ke Aceh, bertuan ke Siak” dengan cara memberikan upeti dan lambang-lambang kesetiaan kepada kedua penguasa (Perret, 2010a, p. 131).

Pada masa pemerintahannya, beliau menerapkan perdagangan terbuka dengan daerah lain melalui jalur laut. Pusat pemerintahan tetap berada di Labuhan Deli sehingga aktivitas perdagangan semakin baik (Batubara, Taslim; Titin, 2019). Kebijakan ini dinilai tepat, sebab komunikasi dengan dunia luar terbangun secara intensif. Maka dari itu, Labuhan Deli menjadi semakin ramai oleh aktivitas perdagangan dengan beragam komoditi serta keterlibatan para pedagang, pendatang dan penduduk setempat, yang pada akhirnya memakmurkan Kesultanan Deli (Jufrida; Ery, 2004).

Pada lawatannya ke Sumatera Timur, John Anderson sempat bertemu dengan Sultan Deli ini. Menurutnya, Kesultanan Deli pernah membuat perjanjian perdagangan dengan Negeri Penang. Diantara isi perjanjian tersebut adalah:

- a. Kesultanan Deli tetap akan mempertahankan hubungan perdagangannya dengan Negeri Penang dan menolak tunduk kepada Belanda serta pihak-pihak asing lainnya.
- b. Kesultanan Deli tidak akan menambah harga cukai atau mengambil cukai lainnya sesuai dalam daftar yang telah tercantum dan telah disepakati oleh Gubernur Penang.
- c. Para pedagang Penang bebas mengimpor setiap barang, dan kegiatan membeli serta menjual di Kesultanan Deli. Segala hambatan atau kesulitan akan dibantu kepada mereka oleh pihak Kesultanan Deli yang bertujuan

meningkatkan pendapatan dan setiap pedagang berlomba-lomba untuk datang ke Deli.

- d. Kesultanan Deli memakai nilai dolar dalam setiap perdagangan (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 83).

Dalam catatan John Anderson, beliau berusaha mengukuhkan Lembaga Datuk Berempat (Datuk Empat Suku), namun buktinya kedatukan Sunggal enggan berada di bawah Kesultanan Deli dan menganggap merdeka serta tidak berada di bawah kekuasaan siapapun. kemudian, masa beliau banyak terjadi peperangan dalam perebutan wilayah seperti Denai dan Percut serta mengalami disintegrasi. Salah satu peperangan yang pernah terjadi yaitu dengan Radin Inu yang mengklaim sebagai penguasa Pulau Brayan. Bahkan Deli pernah terlibat dalam perang saudara di Langkat yang membantu salah satu pihak (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 177).

4. Sultan Osman Perkasa Alamsyah (Sultan Deli ke-VII 1850-1858)

Beliau merupakan Sultan Deli yang ke-VII dengan masa kepemimpinan yang singkat. Masa pemerintahannya, Aceh kembali memiliki pengaruh di Kesultanan Deli. Salah satu strategi yang dilancarkan oleh Aceh adalah dengan mengesahkan Kesultanan Deli sebuah kesultanan yang berdaulat dan berdiri sendiri. Hal ini bertujuan untuk melemahkan pengaruh Siak di Kesultanan Deli. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Kesultanan Deli berada di bawah Aceh. Yaitu, Sultan Osman pernah menentang Aceh dan menyerang kekuasaan Serdang yang ada di Denai, Senembah, Padang (Tebing Tinggi), Bedagai, dan menghancurkan pemberontakan yang ada di Percut. Maka dari itu, Aceh segera mengirim utusannya ke Deli agar Sultan Osman menghadap kepada Sultan Aceh (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 178).

Utusan dari Aceh datang untuk menemui Sultan Osman, bernama Pangeran Husin. Beliau dibawa ke Aceh Darussalam untuk menemui Sultan Mansursyah Alaldin Johan Berdaulat Negeri Aceh. Walhasil, Sultan Osman diberi gelar Alamsyah Raja Negeri Deli dan surat penyerahan Negeri Deli berupa Firman Tsahifah (*Mahor Cap Sembilan*) serta daerah kekuasaan dari Kuala Brayan sampai

Pasir Putih, tidak termasuk Negeri Bedagai dan Langkat (Takari, 2012, p. 78). Walaupun masa kepemimpinan beliau sangat singkat, Kesultanan Deli mengalami kemakmuran yang ditandai dengan pembangunan masjid megah bernama Masjid Raya Al-Osmani yang dibangun pada tahun 1854 M (Jufrida, 2008, p. 63).

5. Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah (Sultan Deli ke- VIII 1858-1873)

Menurut tradisi adat melayu, yaitu raja mangkat raja menanam yang berarti sebelum Sultan Osman wafat, maka dinobatkanlah putra sulungnya bernama Sri Paduka Yang Mahamulia Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alam pada tanggal 4 Rabiul Awal Hijrah dalam tahun bertepatan 1857 M (Takari, 2012, p. 79). Masa kepemimpinannya, Kesultanan Deli membuka peluang bagi para investor untuk mengelolah tanah Sumatera Timur. Salah satu faktor yang menarik adalah, kondisi tanah Sumatera Timur yang memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan (Jufrida, 2008, p. 63).

Masa beliau inilah seorang Belanda bernama Jacobus Nienhuys yang membuka perkebunan tembakau Deli di Sumatera Timur. Dalam hal ini, Sultan Deli membeli lahan kepada Nienhuys untuk ditanami tembakau sesuai dengan kehendaknya tanpa dipungut sewa dari lahan yang telah dipakainya. Bahkan, Nienhuys sempat membuat perjanjian pemakaian tanah selama 99 tahun dengan tanah seluas lebih kurang 12.000 bau (Breman, 1997, p. 22). Beliau juga membuat perjanjian pada 5 Maret 1863 kepada Residen Riau yaitu E. Netscher yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Perjanjian tersebut membahas mengenai pertanahan yang tidak boleh diserahkan kepada pihak asing atau orang-orang Eropa lainnya (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

Situasi masa Sultan Mahmud dipenuhi dengan intrik-intrik internal yang ingin merebut pengaruh dan juga diserang oleh pihak luar, seperti Serdang, Percut, Denai, dan Senembah. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan Sultan Deli sebesar \$. 1.000,- tiap bulan karena aktivitas perdagangan dipindahkan ke Serdang. Salah satu yang menjadi penghalang dari penurunan hasil lada Deli adalah ketika

Serdang memasang ranjau-ranjau bambu sekitar Hulu sungai Deli. Kemudian, paman sultan yang bernama Raja Zainal Abidin pun bekerja sama dengan Serdang untuk merebut tahta Deli (Tengku Luckman Sinar, 1986, p. 10).

Berikut periodisasi dari Sultan Serdang, diantaranya:

1. Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjungan (Sultan Serdang I 1723-1767)

Penulis berasumsi bahwa akibat perpecahan antara Deli dan Serdang mengakibatkan keadaan tidak kondusif sehingga Tuanku Umar lebih memfokuskan diri dalam penetapan wilayah Kesultanan Serdang. Wilayah kekuasaan beliau hanya Kampung Besar Serdang (daerah Lubuk Pakam dan Batang Kuis). Tuanku Umar ditetapkan sebagai Sultan Serdang pertama. Fungsi Sultan Serdang terdiri dari 3 peranan, yaitu sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Agama Islam, dan Kepala Adat Melayu (Tuanku Luckman Sinar, 2006, p. 55).

Pada masa Tuanku Umar, negeri Denai mengaku tunduk kepada Kesultanan Serdang. Saat itu juga, Radja Kecil memprakarsai sebuah ekspedisi untuk memperluas wilayah Siak. Maka, ia pun mulai melakukan perluasan ke daerah Sumatera Timur khususnya Serdang (Batubara, Taslim; Titin, 2019). Menurut sejarah Kesultanan Serdang sendiri menyatakan bahwa terjadi pertikaian antara Kerajaan Melayu Riau-Johor dan Siak. Dari beberapa keterangan yang didapat bahwa Tuanku Umar tewas ketika penyerangan Siak tersebut (Basarshah II, Tuanku Luckman Sinar; Sinar, Silvana; Sinar, Thyrhaya Sinar; Umry, 2007).

Sumber lain, yaitu “Hikayat Indragiri” mengatakan bahwa makam Tuanku Umar berada di Rengat. Hal ini berdasarkan bukti bahwa seorang Sultan Indragiri yang bernama Raja Narasinga memohon bantuan kepada Kesultanan Serdang untuk mengenyahkan Portugis (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

2. Tuanku Ainan Johan Alam Shah (Sultan Serdang ke-II 1767-1817)

Masa beliau Kesultanan Serdang sudah mulai kondusif sehingga Tuanku Ainan Joham Alam Shah mulai menata beberapa kebijakan dan sistem

pemerintahan. Selama masa pemerintahan beliau membuat konsep dan membentuk sebuah institusi atau Lembaga Orang Besar Berempat khusus untuk Kesultanan Serdang, yaitu:

- a. Pengeran Muda, memimpin wilayah Sungai Tuan.
- b. Datuk Maha Menteri, memimpin wilayah Araskabu.
- c. Datuk Paduka Raja, memimpin wilayah Batangkuis.
- d. Sri Maharaja, memimpin wilayah Ramunia.

Wilayah Kesultanan Serdang meliputi Batang Kuis, Padang (Tebing Tinggi), Bedagai, Percut, Senembah (Patumbak), Araskabu, dan Ramunia. Tidak seperti Kesultanan Deli, pusat pemerintahan Kesultanan Serdang tidak strategis. Ini disebabkan tidak ditemukannya sumber bacaan yang membahas mengenai kegiatan perekonomian dari Kesultanan Serdang. Dalam menjalankan pemerintahan, Tuanku Ainan Johan Alam Shah berpedoman pada Hukum Syariat Islam dan memadukannya dengan Hukum Adat sehingga melahirkan sebuah falsafah “Adat Melayu Bersendikan Hukum Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah.” Kemudian, beliau menggagas undang-undang yang mengacu pada empat konsep adat, yaitu:

- a. Adat Sebenar Adat, hal ini sesuai dengan hukum alam, seperti api panas, air dingin, siang-malam, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.
- b. Adat yang Diadatkan, hal ini sesuai dengan permufakatan Orang Raja dan Para Orang Besar Kerajaan.
- c. Adat yang Teradat, hal ini sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi.
- d. Adat-Istiadat, hal ini hanya berlaku di istana raja (Azhari, 2013, pp. 36–37).

3. Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah (Sultan Serdang III 1817-1850)

Masa Tuanku Sultan Thaf Sinar Kesultanan Serdang mengakui berada dibawah kekuasaan siak. Wilayah Kesultanan Serdang di masa beliau meliputi Percut, Padang (Tebing Tinggi), Bedagai, Senembah (Patumbak), dan Batak Timur Dusun. Sultan sendiri memiliki beberapa armada kapal dagang dan melakukan

aktivitas perdagangan sampai ke Penang. Pada tahun 1823, seorang penjelajah asal Inggris bernama John Anderson mencoba mencatat keadaan Sumatera Timur tidak terkecuali Kesultanan Serdang masa Tuanku Thaf Sinar Basarshah (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

Berikut catatan yang ditulis oleh John Anderson dalam bukunya *Mission To The East Coast Of Sumatra In 1823* ketika berkunjung ke Kesultanan Serdang yang dikutip oleh Luckman Sinar, salah satunya di bidang industri. Kesultanan Serdang memproduksi kain bernama “Berkampong” yang mirip seperti kain bugis dan serawal yang mirip dengan celana Aceh. Kebijakan lainnya yaitu di bidang perdagangan dimana sultan berharap hubungan dengan Penang terus berlanjut, karena Serdang sering melakukan kegiatan ekspor lada ke negeri tersebut (Tuanku Luckman Sinar, 1971, pp. 71 & 82).

Menurut Azhari, ada beberapa poin penting dari kebijakan Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah sehingga Kesultanan Serdang mengalami kemajuan, diantaranya:

- a. Kegiatan perdagangan antara Serdang dan Negeri Penang sangat ramai terutama komoditi lada dan hasil hutan.
- b. Beliau memiliki sifat lemah lembut dan mencintai ilmu pengetahuan.
- c. Sektor industri rakyat mengalami peningkatan. Bahkan Serdang menjadi jalur perdagangan oleh para pedagang Alas yang menjual barang dagangannya ke luar negeri.
- d. Sikap beliau sangat toleran dan suka bermusyawarah dengan para pemimpin dari negeri-negeri wilayah taklukan Serdang, salah satunya orang-orang Batak dari Pedalaman.
- e. Cukai di Kesultanan Serdang berada di tengah-tengah, artinya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

4. Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah (Sultan Serdang IV 1819-1880)

Ada dua versi sejarah yang dijelaskan mengenai Sultan Basyaruddin, versi yang pertama adalah menurut sejarawan Ichwan Azhari, bahwa zaman beliau

merupakan zaman kemerosotan. Pernyataan ini memiliki landasan bahwa pada masa kepemimpinan beliau, Serdang ditaklukan oleh Belanda yang datang pada 1862 M. Dengan surat yang tercantum dalam Acte van Erkenning menunjukkan tanggal 16 Agustus 1862. Ini menyebabkan beliau memohon bantuan kepada Aceh untuk menyerang pasukan Belanda. Selain itu, pertikaian juga terjadi dengan pihak Kesultanan Deli mengenai perluasan wilayah (Azhari, 2013, p. 40).

Pendapat ini diperkuat ketika Denai yang dipimpin oleh Raja Graha mengaku merdeka. Akan tetapi Deli datang untuk menguasai wilayah Denai, oleh karenanya Sultan Osman mengusir Raja Graha ke Serdang. Penyebabnya karena pernah bersekutu dengan Radin Inu yang merupakan Raja Brayan untuk membangun kepada Deli. Maka, Sultan Basyarudin segera mengambil tindakan dengan merebut Denai dan mengusir wakil Sultan Deli yaitu Tan Megah (Tengku Luckman Sinar, 1986, p. 21).

Sebaliknya, dalam sejarah Serdang yang ditulis oleh Tengku Luckman Sinar, menyatakan bahwa Kesultanan Serdang mencapai puncak kejayaannya dikarenakan beliau memperluas wilayahnya sampai ke Batubara, termasuk seluruh Senembah dan ke pedalaman Kabupaten Deli-Serdang yang merupakan wilayah dari etnis Karo dan Batak Timur. Oleh karena itu, beliau diberi gelar “Syaiful Alamsyah” yang berarti pedang alam (Basarshah II, Tuanku Luckman Sinar; Sinar, Silvana; Sinar, Thyrhaya Sinar; Umry, 2007).

Masa pemerintahan beliau, terdapat beberapa kali pergantian Orang-Orang Besar dan Wazir-Wazir. Beberapa dari mereka yang sempat tercatat adalah T.sebagai berikut:

- a. Raja Muda Pangeran Muda Sri Diraja Mohd. Thakir, penguasa Kampung Klambir. Ia meninggal pada tahun 1863 M, kemudian digantikan oleh Sutan Aman bin Tuanku. Zainal Abidin yang memiliki gelar Raja Muda Seri Maharaja (Raja Muda ke-III).
- b. T. Seri Maharaja Twk. Agong di Kampung Durian.

- c. T. Panglima Besar Moehd. Ali, penguasa di Sungai Tuan. Namun pada tahun 1886 M ketika anaknya memimpin, wilayah ini menjadi milik Kesultanan Deli yang diberi oleh Belanda.
- d. T. Temenggong Tan Siddik
- e. Datuk Pekerma Raja Zainuddin, penguasa wilayah Tanjung Morawa.

Lalu, ada Orang-Orang Besar yang memimpin beberapa wilayah yang berada dibawah Kesultanan Serdang, yaitu:

- a. Lima Laras Batubara: dipimpin oleh Datuk Laksamana Putera Raja Negeri Serdang.
- b. Padang (Tebing Tinggi): dipimpin oleh Maharaja Graha Marahkun. Tetapi, pada tahun 1865 wilayah ini diambil oleh Belanda dan diberikan kepada Kesultanan Deli.
- c. Bedagai: dipimpin oleh Datuk Putera Raja Negeri Serdang Ahmad Yuda sebagai Wazir Bedagai. Ia tewas ditangan Belanda pada tahun 1865 M. kemudian, Belanda mengambalalih Bedagai dan diberikan kepada Kesultanan Deli.
- d. Percut: dipimpin oleh Kejeruan Seri Diraja Sutan Syarif. Setelah ia wafat, kepemimpinan digantikan oleh adiknya yaitu Kejeruan Muda Seri Diraja Mohd. Daud. Namun pada tahun 1865, Belanda berhasil merebut wilayah ini dari Serdang yang kemudian diberikan kepada Kesultanan Deli.
- e. Senembah: dipimpin oleh Kejeruan Seri Diraja Sutan Saidi, Wazir Senembah (Tadukan Raga).
- f. Patumbak: dipimpin oleh Kejeruan Syahdewa. Namun, Belanda kembali berhasil merebut wilayah ini dan diberikan kepada Kesultanan Deli.
- g. Serbajadi: dipimpin oleh Kejeruan Santun Setia Raja Tan Deraman. Tetapi, diusir oleh pihak Kesultanan Serdang karena berpihak kepada hun Kesultanan Deli.
- h. Denai: dipimpin oleh Raja Denai Raja Graha Jaudin. Tahun 1865 M, Belanda berhasil merebut wilayah ini dan diberikan kepada Deli. Namun tahun 1882 M, Belanda mengembalikan Denai kepada Kesultanan Serdang.

- i. Perbaungan: dipimpin oleh Raja Perbaungan Tuanku Rahmadsyah, setelah beliau wafat, maka diwakili oleh Temenggong Sutan Siddik.

Selain itu, Sultan Basyarudin membentuk sebuah lembaga diluar dari Dewan Kerajaan bernama “Lembaga Orang Besar Berlapan” untuk mengurus beberapa daerah seperti :

- Batak Timur Dusun: Wakil Sultan yaitu Pangeran Mangku Negara T.H.M. Yasin.
- Rantau Panjang: dipimpin oleh Datuk Lela Setia Diraja.
- Bandar Labuhan: T. Panglima Sutan Hasan, setelah ia mangkat digantikan oleh putranya bernama T. Habsyah.
- Lengo Seperang/ Kuala Namu.
- Kampung Besar: dipimpin oleh Datuk Hitam.
- Pantai Cermin Kanan.
- Pantai Cermin Kiri.
- Batang Kuis: dipimpin oleh Datuk Bentara Seri Diraja Nakhoda Baung.
- Medan Senembah.
- Pertumbukan.
- Tambak Cikur (Tengku Luckman Sinar, 2003, pp. 18–20).

Pada masa pemerintahan beliau, ada sebuah insiden yaitu penyitaan oleh Pangeran Muda Diraja Serdang terhadap kapal dagang Inggris milik James Carnegy. Sehingga kabar berita itu sampai terhembus ke Penang. Penyebabnya adalah pemilik kapal tidak melunasi hutang-hutangnya kepada para pedagang di Serdang. Akibatnya, Gubernur Inggris di Penang melakukan protes kepada Belanda yang pada saat itu sedang berkuasa di wilayah tersebut, tetapi tidak ada hasilnya. Maka, Gubernur Penang mengirimkan armada kapal perang Inggris, HMS. “Hoogly” untuk memberikan pelajaran kepada Serdang, namun hasilnya nihil (Sinar T. L., 2003, p. 19).

C. Pengaruh Aceh, Siak, dan Intervensi Pihak Asing di Kesultanan Deli-Serdang

Dari segi historis, Kesultanan Deli memiliki hubungan dengan Aceh ketika masa pemerintahan Gocah Pahlawan sebagai wazir di Deli bagi Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda memberikan kekuasaan dan hak-hak penuh kepadanya. Selain itu, ada beberapa penyebab lain atas Kesultanan Deli oleh Aceh, yaitu politik ekspansi atau perluasan wilayah oleh Aceh dan untuk menyerang Johor serta Portugis yang menjadi musuh utamanya (Pelly, R, & Alfian, 1986, p. 74). Menurut Azhari, Kerajaan Aceh mempunyai tujuan lain mengirimkan Gocah Pahlawan ke Deli, Salah satunya adalah menghancurkan sisa-sisa perlawanan Haru (Aru) yang mendapat bantuan dari Portugis dan melakukan Islamisasi ke wilayah pedalaman (Azhari, 2013, pp. 32-33).

Berbeda halnya dengan Perret, menurutnya tujuan Kerajaan Aceh menguasai wilayah Sumatera Timur khususnya Deli adalah untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam. Hal ini memiliki keuntungan ekonomi dengan hasil pertanian, melihat wilayah Deli memiliki tanah yang subur. Pendapatnya lagi adalah bahwa Kerajaan Aceh berniat menggunakan wilayah ini sebagai pengkalan yang bertujuan untuk menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Pendapatnya yang terakhir adalah Kerajaan Aceh menguasai wilayah ini bertujuan meluaskan agama Islam pada masyarakat yang belum memiliki agama (Perret, 2011, p. 73).

Menurut *Hikayat Deli*, pengaruh Aceh sangat kuat pada Kesultanan Deli yang ditandai dengan pemberian gelar “Panglima” kepada pemimpin-pemimpin Kesultanan Deli (Perret, 2010a). Namun pengaruh Aceh di beberapa Kesultanan Sumatera Timur, khususnya Deli, mulai lemah. Ini dikarenakan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda tidak ada seorang pengganti seperti dirinya dalam mempertahankan kebesaran Aceh.

Kemudian, Aceh mengalami kemunduran ketika secara berturut-turut dipimpin oleh pemimpin wanita selama 59 tahun (Yatim, 2008, p. 232). Akibatnya pada tahun 1669 M, menurut Husny, Kesultanan Deli di masa kepemimpinan Tuanku Panglima Perunggit memerdekakan diri dari Aceh (Pelly, Usman; R, Ratna;

Alfian, 1986). Padahal, sebenarnya Aceh hanya memberikan otoritas penuh kepada Kesultanan Deli (Usman; dkk Pelly, 2019).

Momentum ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Siak Sri Inderapura untuk merebut pengaruh di Kesultanan Melayu Sumatera Timur. Menurut Perret, sekitar abad ke-17, terjadi situasi yang tidak menentu di Sumatera Timur. Hal ini diakibatkan oleh perebutan pengaruh kedaulatan antara Aceh dan Siak. Tetapi, para pemimpin di Kesultanan Sumatera Timur, khususnya Deli dan Serdang lebih memilih jalan tengah, sehingga memunculkan sebuah istilah “beraja ke Aceh, bertuan ke Siak”. Kesetiaan ini ditandai dengan pemberian upeti kepada kedua kerajaan tersebut (Perret, 2010a, p. 131).

Deli pada masa pemerintahan Sultan Panglima Mangedar Alam memilih untuk berdiplomasi kepada Kerajaan Siak dikarenakan ada keuntungan politik. Selain itu, alasan lainnya adalah karena menurut hukum kanun yang telah disusun oleh Tuanku Gocah Pahlawan, sebagai pendiri dari Kesultanan Deli, seorang pemimpin itu harus laki-laki. Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultanah-Sultanah, maka Kesultanan Deli menolak untuk menyembah kepada pemimpin perempuan. Namun, tetap mempertahankan hubungannya. Oleh karena itu, Kesultanan Deli lebih memilih untuk dipertuan oleh Siak karena dipimpin oleh seorang pemimpin laki-laki. Maka, muncullah sebutan “Beraja ke Aceh, Bertuan ke Siak” (wawancara dengan Tengku Moharsyah pada 17 September 2021).

Sementara, Kesultanan Serdang mendapat pengakuan atas pemisahan diri dengan Kesultanan Deli dari Kerajaan Siak pada tahun 1815 M. Pada saat itu, Siak memberikan cap kerajannya. Maka dari legalitas yang telah diterima ini, Serdang mulai meluaskan daerah kekuasaannya sehingga mengalami perimbangan dengan Deli (Usman Pelly, 2016).

Tahun 1853, Kerajaan Aceh kembali menguasai wilayah Pantai Timur dibawah kepemimpinan Tuanku Ibrahim dengan utusannya Pangeran Husin. Ia mengirim sebuah armada besar yang berjumlah dua ratus perahu Aceh. Alhasil, Pangeran Husin memaksa penguasa Langkat, Deli, dan Serdang menerima kekuasaan Ibrahim dengan menggunakan stempel baru yang bertuliskan “wakil Sultan Aceh (gelar ini juga memiliki arti *pahlawan*, *wakil*, dan *wazir*) (Reid, 2007, p. 17).

Namun pada tahun 1854, Kerajaan Siak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ismail, mengalami konflik internal. Akibat situasi ini, Siak terpaksa harus dipukul mundur dari semua negeri di Pantai Timur sampai Serdang di Selatan dikarenakan mengesahkan kekuasaan Sultan Ibrahim. Siak tidak dapat membalas perlakuan tersebut yang pada akhirnya, Sultan Ismail meminta bantuan kepada Gubernur Inggris yang ada di Singapura, yaitu E. A. Blundell, namun sia-sia. Walhasil, ia membuat perjanjian kepada Kerani Kepala kantor dagang di Singapura, bernama Adam Wilson, dengan tujuan mengalahkan Tengku Putra dan mengembalikan kekuasaannya atas wilayah-wilayah bawahannya. Tetapi dengan syarat, yaitu mendapatkan hak-hak istimewa dalam bidang perdagangan dan mendapatkan laba yang berkisar sepertiga dari wilayah yang berhasil direbut kembali.

Akan tetapi, Sultan Ismail menolak permintaannya dengan alasan imbalan tersebut terlalu tinggi. Maka, Wilson menyerangnya sehingga Sultan Ismail meminta bantuan kepada Belanda di Riau (Pelzer, 1985, p. 27). Melalui perantara dari Tengku Putra yang merupakan adik dari Sultan Ismail, mencoba untuk mengusir Wilson karena telah melanggar perjanjian Inggris tahun 1824. Melalui Raja Muda dari Riau, ia meminta bantuan Residen Belanda. Begitu pun dengan Sultan Ismail yang meminta bantuan kepada pihak Belanda karena kecewa dengan Wilson. Pada tahun 1857, kedua kakak-beradik ini akhirnya membuat perjanjian persahabatan dari J. F. N. Nieuwenhuyzen, selaku Residen Belanda di Riau.

Tahun-tahun berikutnya, kedua utusan Belanda, yaitu Nieuwenhuyzen dengan penggantinya sebagai Residen Riau yang baru yaitu bernama J. H. Tobias, mengadakan sebuah perjanjian bersama Sultan Ismail, Tengku Putra, dan empat kepala suku Siak. Perjanjian ini dikenal dengan Traktaat Siak yang dilakukan pada 1 Februari 1858. Pada pasal 2 dari perjanjian ini, menetapkan wilayah-wilayah yang berada di bawah kedaulatan Siak, diantaranya Asahan, Batubara, Serdang, Deli, Langkat, dan Tamiang (Reid, 2007, pp. 27–31). Pada masa yang akan datang, Belanda memanfaatkan perjanjian ini untuk

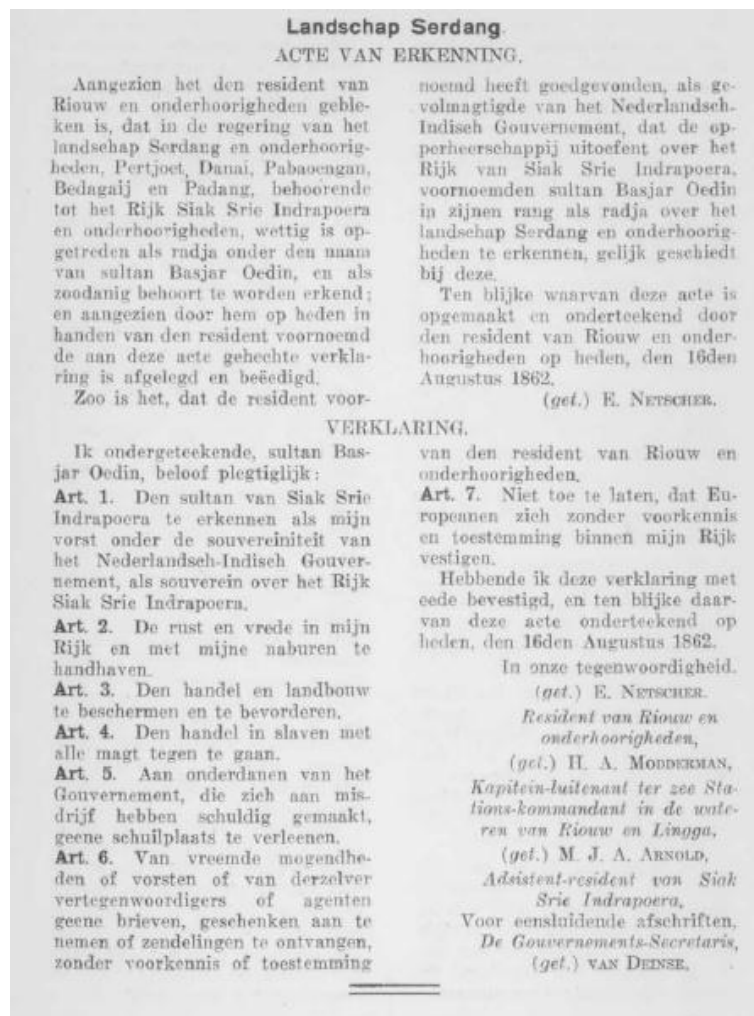
mengekspansi serta bertujuan untuk menyudahi kebebasan Kesultanan-Kesultanan yang ada Sumatera Timur (Tuanku Luckman Sinar, 2006, p. 184).

Perjanjian ini pun memunculkan perdebatan antara Siak dan Aceh mengenai wilayah Sumatera Timur. Aceh kemudian merespon mengenai maksud dan tujuan Belanda, yaitu agar melemahkan pengaruh Aceh di Sumatera Timur. Maka Sultan Ala'uddin Manshur Shah membuat siasat, yaitu mengirim beberapa utusan untuk menyelidiki sejauh mana kesetiaan kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur kepada Aceh (Said, 1961, p. 301).

Elisa Netscher menduduki jabatan baru sebagai Residen Riau pada tahun 1861. Maka, ia memberikan bantuan kepada Sultan Ismail dari beberapa tuntutan-tuntutan dan hal tersebut dijalankan secara efektif. Netscher mendukung kebijakan ekspansi dengan memanfaatkan perjanjian 1858. Ketika tanggal 27 Maret 1862, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia memerintahkan Netscher mencari jalan damai untuk menarik kerajaan-kerajaan pesisir ini dari genggaman Aceh dan membujuk mereka tunduk kepada Siak. Tentunya bertujuan untuk menetapkan kembali kekuasaan Belanda di Sumatera Timur (Pelzer, 1985, p. 28)

Pada tanggal 12 Agustus 1862 M, Netscher berkunjung ke Serdang. Ia mengutus residen Bengkalis untuk mengabarkan kedatangan Netscher kepada Sultan Basyaruddin untuk berunding. Sultan Basyaruddin pun memenuhi kunjungan itu dan mendatangi kapal Belanda. Sultan kemudian berdiplomasi kepada Belanda dan membangun kerja sama, namun sultan tidak bersedia tunduk dibawah kekuasaan Siak. Belanda mempunyai cara lain untuk mengelabui sultan, yaitu sultan dipaksa untuk menandatangani perjanjian atau Belanda menduduki wilayah Serdang. Maka, sultan pun menyetujui perjanjian tersebut dengan mengaku tunduk kepada Belanda dibawah pengaruh Siak beserta wilayahnya, yaitu Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang (Tebing Tinggi).

Berikut merupakan pernyataan Residen Netscher untuk Sultan Basyaruddin:



Gambar 4. Arsip *Acte van Erkenning* Antara Residen Netscher Dengan Kesultanan Serdang

Sumber: Koleksi Pribadi Perpustakaan Tengku Luckman Sinar dan Bisa Diakses di Delpher.nl

Arsip ini kurang lebih memiliki arti sebagai berikut:

Kerajaan Deli
Akta Dari Pengakuan

Setelah dilihat oleh Resident dan kawasannya ternyata bahwa didalam pemerintahan kerajaan Serdang termasuk kedalam jajahannya Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang (Tebing Tinggi) termasuk kedalam Kerajaan Siak Sri Indrapura dan kawasannya. Sah bertindak sabagai Raja dengan nama Sultan Basyaruddin dan oleh karena demikian ia diakui; dan melihat bahwa dia

menyerahkan keterangan Residen hari ini, pernyataan tercantum dalam akte ini dan ia disumpah untuk itu. oleh karena sebab itu, Residen menerima dengan baik sekali selaku kuasa dari Pemerintah Hindia Belanda, yang berkuasa atas Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Basyarudin tersebut dalam kedudukannya sebagai Raja Serdang dan jajahannya sepenuhnya diakui seperti telah terlaksana seperti ini. Oleh karena itu, maka akte ini diperbuat dan ditandatangani oleh Residen Riau dan kawasannya pada hari ini 16 Agustus 1862

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Sultan Basyaruddin berjanji:

1. Saya mengakui bahwa Kesultanan Deli dan wilayah kekuasaannya berada dibawah kedaulatan Sultan Siak sebagai Raja yang dibawah pengaruh Pemerintah Hindia Belanda, yang telah menduduki Kerajaan Siak Sri Indrapura.
2. Keamanan dan ketentraman dalam kerajaan saya dan wilayah kekuasaan saya harus dipertahankan.
3. Kegiatan perdagangan dan pertanian dalam kerajaan saya harus dilindungi dan dikenalkan.
4. Perdagangan budak akan dihapuskan.
5. Saya berjanji tidak akan memberi perlindungan kepada pihak Gubernemen yang melakukan kejahatan.
6. Tidak akan menerima surat, hadiah, atau menerima utusan dan kuasa asing atau raja atau utusan atau agen mereka tanpa izin Residen Riau dan kawasannya.
7. Tidak mengizinkan orang Eropa masuk tanpa pengetahuan dan izin tinggal dalam kerajaan saya.

Setelah pernyataan ini saya dengan sumpah diperkuat, oleh karenanya akte ini ditandatangani tgl 26 Agustus 1862.

Dengan kehadiran kami,

(w.g.) E. Netscher,

Residen Riau dan Kawasannya

(w.g.) H. A. Modderman,

Kapten Letnan Angkatan Laut Komanda Stasiun Perairan Riau dan Lingga

(w.g.) M. J. A. Arnold,

Ass Residen Riau Siak Sri Indrapura

Dalam catatan Kolonial *Verslag* tahun 1865 M, menyebutkan bahwa Kesultanan Serdang meminta bantuan kepada Asahan untuk melawan Belanda. Informasi ini diketahui oleh Belanda sehingga mengeluarkan perintah Besluit Gubernur Jenderal No.1 tertanggal 25 Agustus 1865 M. Belanda mulai mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Kesultanan Serdang dan Asahan. Ekspedisi ini dinamakan “Militaire Expeditie Tegen Serdang En Asahan”. Tanggal 3 Oktober, Belanda berhasil mengalahkan

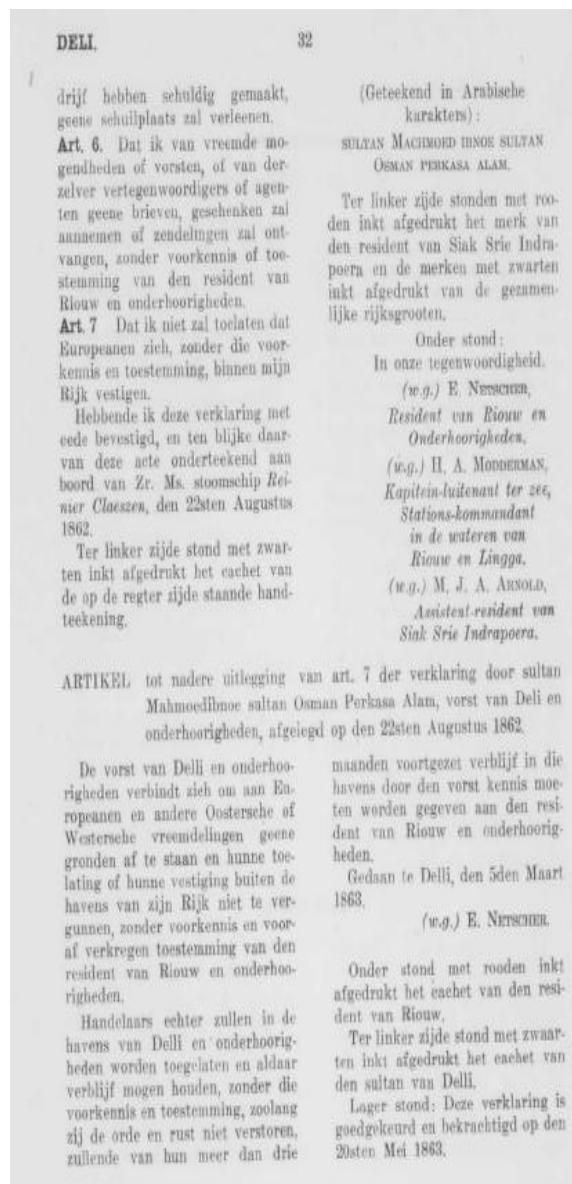
perlawanan Kesultanan Serdang dan menangkap Sultan Basyaruddin. Lalu, Belanda memberikan hadiah kepada Deli berupa wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Serdang, yaitu Percut, Denai, Perbaungan, Badagai, Padang (Tebing Tinggi) (Ekspedisi Militer Melawan Serdang dan Asahan) (Batubara, Taslim; Titin, 2019).

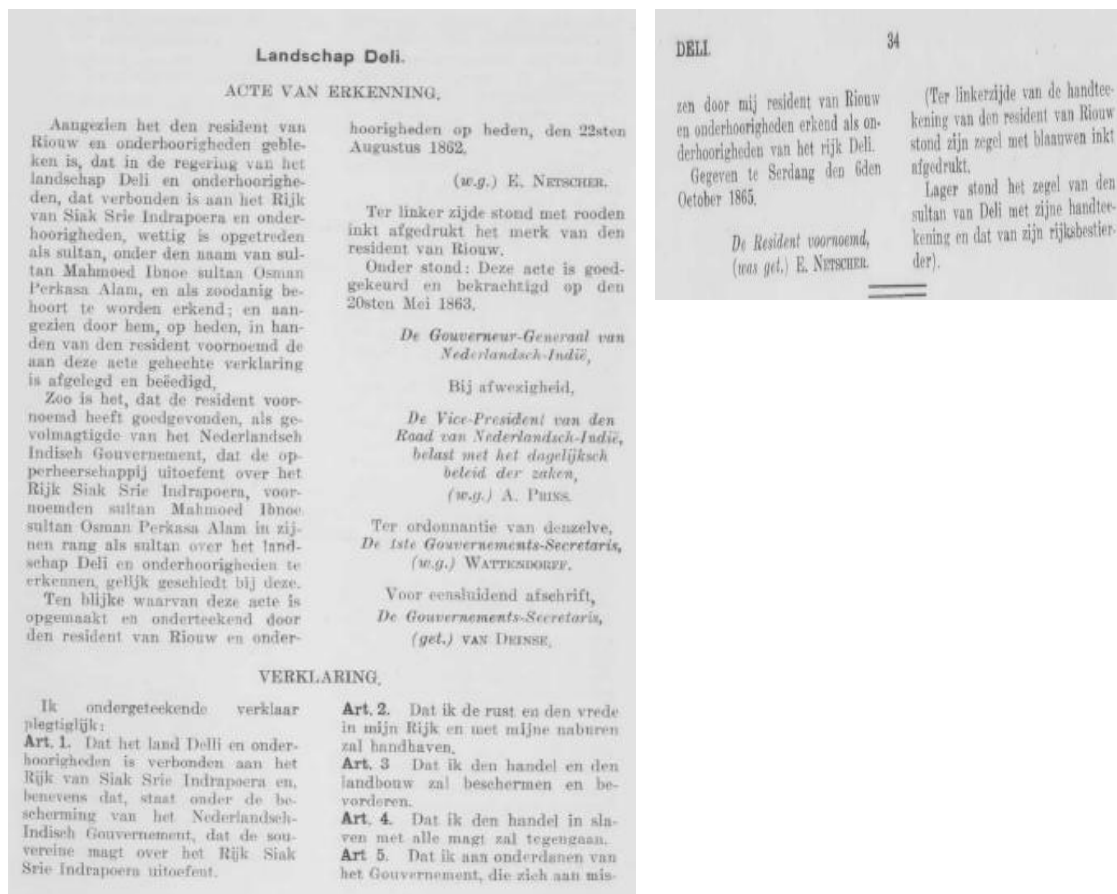
Perjalanan kemudian dilanjutkan pada 21 Agustus, Netscher berkunjung ke Labuhan Deli. Kesultanan Deli menyambut kedatangannya untuk melakukan perundingan. Sultan Mahmud yang pada saat itu menjadi Sultan Deli ke-VIII, menolak menyetujui perjanjian yang ditawarkan oleh Belanda untuk tunduk dibawah kekuasaan Siak (Said, 1961, pp. 306–307). Namun Netscher mengambil cara lain, pada akhirnya Sultan Deli menerima perjanjian tersebut dengan catatan Deli dan Siak memiliki derajat yang sama berada di bawah perlindungan Belanda (Pelzer, 1985, p. 28).

Perjanjian antara Sultan Deli dengan E. Netscher selaku *Residen Riau en Onderhoorigheden* (Residen Riau dan wilayah taklukannya) dilakukan pada 22 Agustus 1862. Perjanjian ini kemudian dinamakan *Acte van Verband* dan disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah Sultan Deli taat dan setia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan melaksanakan pemerintahan di Deli sesuai dengan adat dan peraturan; bersedia memajukan negeri dan rakyat; serta bersedia mematuhi syarat-syarat penentuan akte yang belum jelas atau belum tercantum. Setelah rentangan waktu beberapa tahun, Netscher kembali menambah isi perjanjian dengan Sultan Mahmud Perkasa Alam pada 5 Maret 1863. Diantaranya bahwa Deli tidak akan memperjualbelikan tanah-tanahnya kepada pihak asing atau Eropa kecuali hanya kepada pemerintah kolonial saja. Maka dari itu, pemerintah kolonial membangun kantor perwakilannya dan menempatkan kontrolir J. A. M. de Cats Baron de Raet di Labuhan yang merupakan ibukota Kerajaan Deli (Nasution, 2018, pp. 66–67).

Dari keterangan pihak Kesultanan Deli bahwa perjanjian ini sudah terbakar pada peristiwa revolusi sosial tahun 1946. Tetapi, penulis

menemukan arsip lain yaitu *Acte Van Erkenning* pada masa Sultan Mahmud Perkasa Alam, dari *website Delpher.nl* dengan judul buku *Mededeelingen van De Afdeeling Betuurszaken Der Buitengewesten van Het Departement van Binnenlandsch Bestuur Serie A No. 3 Overeenkomsten Met De Zelfbesturen In De Buitengewesten.*





Gambar 5. Arsip *Acte van Erkenning* Antara Residen Netscher Dengan Kesultanan Deli
Sumber: *Delpher.nl*

Arsip ini kurang lebih memiliki arti sebagai berikut:

Kerajaan Deli
Akta Dari Pengakuan

Setelah dilihat oleh Resident dan kawasannya ternyata bahwa didalam pemerintahan kerajaan Deli termasuk kedalam kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura dan kawasannya. Sah bertindak sabagai Raja dengan nama Sultan Mahmud Ibnu Sultan Osman Perkasa Alam, dan oleh karena demikian ia diakui; dan melihat bahwa dia menyerahkan keterangan Residen hari ini, pernyataan tercantum dalam akte ini dan ia disumpah untuk itu. oleh karena sebab itu, Residen menerima dengan baik sekali selaku kuasa dari Pemerintah Hindia Belanda, yang berkuasa atas Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Mahmoed Ibnu Sultan Osman Perkasa Alam tersebut dalam kedudukannya sebagai Raja Deli dan jajahannya sepenuhnya diakui seperti telah terlaksana seperti ini. Oleh karena itu, maka akte ini diperbuat dan ditandatangani oleh Residen Riau dan kawasannya pada hari ini 22 Agustus 1862

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Sultan Mahmoed Ibnu Sultan Osman Perkasa Alam:

8. Saya mengakui bahwa Kesultanan Deli dan wilayah kekuasaannya berada dibawah kedaulatan Sultan Siak sebagai Raja yang dibawah pengaruh Pemerintah Hindia Belanda, yang telah menduduki Kerajaan Siak Sri Indrapura.
9. Keamanan dan ketentraman dalam kerajaan saya dan wilayah kekuasaan saya harus dipertahankan.
10. Kegiatan perdagangan dan pertanian dalam kerajaan saya harus dilindungi dan dikenalkan.
11. Perdagangan budak akan dihapuskan.
12. Saya berjanji tidak akan memberi perlindungan kepada pihak Gubernemen yang melakukan kejahatan.
13. Tidak akan menerima surat, hadiah, atau menerima utusan dan kuasa asing atau raja atau utusan atau agen mereka tanpa izin Residen Riau dan kawasannya.
14. Tidak mengizinkan orang Eropa masuk tanpa pengetahuan dan izin tinggal dalam kerajaan saya.

Setelah pernyataan ini saya dengan sumpah diperkuat, oleh karenanya akte ini ditandatangani di atas kapal *Reinier Claeszen* tgl 22 Agustus 1862. Dengan cap tanda tangan yang tertera di sebelah kanan.

(Ditulis dalam tulisan arab):

Sultan Machmoed Ibnoe Sultan Osman Perkasa Alam.

Dengan kehadiran kami,

(w.g.) E. Netscher,

Residen Riau dan Kawasannya

(w.g.) H. A. Modderman,

Kapten Letnan Angkatan Laut Komanda Stasiun Perairan Riau dan Lingga

(w.g.) M. J. A. Arnold,

Ass Residen Riau Siak Sri Indrapura

D. Dampak Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang. Diantaranya adalah dari sisi sistem pemerintahan, wilayah dan ekonomi. Jika dilihat dari segi politik, antara Kesultanan Deli dan Serdang memiliki kedaulatannya sendiri. Hal ini tercatat pada pernyataan antara Kesultanan Deli dan Serdang yaitu Sultan Amaludin Mangedar Alam dengan Tuanku Thaf Sinar Basharshah. Namun, naskah asli pernyataan ini yang disimpan di istana Serdang sudah terbakar akibat terjadi revolusi sosial. Berikut merupakan isi dari pernyataan tersebut:

1. Kedua Kesultanan ini masing-masing berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri.
2. Cukai pelabuhan dari Labuhan Deli dibagi dua antara Kesultanan Deli dan Serdang (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 131).

Dalam sistem pemerintahan, dampak yang dirasakan adalah Keduanya sama-sama berdaulat dan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. sementara itu, salah satu kebijakan politik kedua kesultanan mencoba untuk menanamkan pengaruhnya pada penguasa setempat, seperti Sultan Deli yang memperkuat posisi Datuk Empat Suku sebagai penasihat, tetapi Sultan Serdang setelah berdaulat sendiri membentuk Wazir Berempat sebagai penasihat sultan. Namun, Datuk Sunggal memiliki posisi yang istimewa diantara kedatukan lainnya, yaitu tidak pernah tergantikan dalam proses penobatan sultan selanjutnya sebagai pembaca Ulon Janji.

Pada Kesultanan Serdang, wazir berempat itu adalah: (1) Kepala Distrik Kampung Besar yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Araskabu dengan gelar *datuk paduka mahamentri*, (2) Kepala Distrik Ramunia yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Kampung Durian dan Denai dengan gelar *maharaja*, (3) Kepala Distrik Kampung Baru yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Batangkuis dengan gelar *datuk paduka raja*, (4) Kepala Distrik Lubuk Pakam yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Lubuk Pakam dengan gelar *bendahara* (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986).

Dampak politik lainnya, ada beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa wilayah yang berada dibawah pengaruh Kesultanan Deli. Seperti kedatukan Sunggal dan Raja Pulau Brayan yang merasa tidak cocok dengan Sultan Deli, yaitu Panglima Mangedar Alam. Sultan memiliki siasat untuk menaklukkan Sunggal dengan menikahi adik dari Datuk Sunggal bernama Dayan Sermaidi, namun tidak berhasil (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 183). Tetapi setelah Belanda berhasil menundukkan kedua kesultanan, pemberontakan dapat diredakan dan situasi politik kembali stabil,

meski Serdang sedikit tidak menerima beberapa keputusan yang merugikan pihaknya.

Isi kedua dari perjanjian ini, mengarah kepada segi ekonomi yang menjelaskan gambaran bahwa Labuhan Deli merupakan pelabuhan strategis. Sehingga kedua kesultanan ini memiliki minat untuk mengambil keuntungan dari pemakaian pelabuhan demi kemajuan ekonomi (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986). Salah satu komoditas yang menarik para pedagang asing adalah lada yang di ekspor ke Penang dan Malaka (Tuanku Luckman Sinar, 1971, p. 81). Tahun 1822 M, laporan Inggris mencatat jumlah ekspor lada pihak Kesultanan Deli sekitar 26.000 ton dan Serdang sekitar 8.000 ton. Dalam catatan John Anderson tahun 1823 M, ia mengasumsikan bahwa kegiatan ekspor di Kesultanan Deli dan Serdang sekitar 3.500 ton lada per tahun (Perret, 2010b, p. 107).



Gambar 6. Labuhan Deli Tahun 1885

Sumber: Nationaalarchief.nl

Untuk laporan perkembangan kegiatan ekonomi di Kesultanan Deli dan Serdang dalam kegiatan ekspor perkebunan:

Komoditas	1862	1863	1864	1865
Lada	415	880	1943	960
Pala	25	4	9	11

Tembakau	25	19	25	40
----------	----	----	----	----

Tabel 2. Dalam satuan ton, data diambil dari buku Daniel Perret “*Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur*”

Kesultanan Deli yang dipimpin oleh Sultan Mahmud, pernah mengalami penurunan pendapatan. Hal ini tidak hanya disebabkan karena intrik politik yang terjadi dalam Kesultanan Deli, seperti para pemberontak yang ingin merampas kekuasaan. Namun ada hal lain, yaitu Serdang memiliki siasat yaitu meletakkan ranjau bambu di hulu Sungai Deli. Sehingga kegiatan Sultan Deli dalam mengekspor lada ke Penang menjadi terhambat (Tengku Luckman Sinar, 1986, p. 10).

“Jika kedua kesultanan ini ingin berkembang pesat, maka harus menguasai wilayah pesisir yang menjadi sektor kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Kesultanan Deli dan Serdang. Dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, membentuk prajurit, membangun istana, dan sebagainya” (wawancara dengan Suprayitno, tanggal 20 September 2021).

Selain itu, dampak ekonomi yang dirasakan dari kontestasi politik antara kedua kesultanan ini adalah mencari eksistensi. Kegiatan ekspor ke Penang dan Malaka yang dilakukan, menjadikan kedua kesultanan ini terkenal sebagai penghasil sumber daya alam, khususnya lada. Ketika J. Nienhuys pada tahun 1863, ia melakukan riset penanaman tembakau di Deli, dan memberikan hasil yang cukup memuaskan, maka tembakau Deli menjadi komoditas terbaik yang dimiliki Kesultanan Deli. Untuk memajukan dan mengembangkan pemerintahannya, kedua kesultanan ini sama-sama ingin menguasai wilayah pesisir yang pada saat itu menjadi tempat strategis untuk perdagangan.

Tidak hanya lada yang menjadi komoditas ekspor yang diperlukan oleh pedagang asing, tetapi garam, kuda dan budak yang didapat dari pedalaman ketika terjadi perang antar kelompok. Tetapi para penghasil lada hanya terbatas pada kalangan tertentu saja, seperti sultan dan datuk. Hal ini tercatat dari laporan Netscher yang mengamati pada tahun 1864 M, bahwa Sultan Deli membuat beberapa aturan terkait penanaman lada kepada orang

Batak demi kepentingannya. Selain itu, para datuk memainkan peranan dalam memonopoli perdagangan garam pada beberapa wilayah (Perret, 2010b, pp. 102 & 114).

Untuk dampak perluasan wilayah, pada masa Sultan Basyarudin Syaiful Alamsyah terjadi pertikaian dengan Deli. Wilayah yang menjadi perebutan adalah Percut, Denai, Senembah, Padang (Tebing Tinggi), dan Bedagai. Ketika Kesultanan Deli dipimpin oleh Sultan Mangedar Alam, ia pernah menuntut bahwa Percut, Buluh Cina, dan Langkat berada dibawah kekuasaannya. Namun pada tahun 1814, Percut memerdekakan diri dari pengaruh Deli, tentunya dibantu oleh Serdang (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986).

Dalam catatan Schadee, Kejeruan Percut yang penguasanya merupakan anak keturunan Tuanku Jalaludin tidak ingin berada dibawah pengaruh Deli. Netscher yang pada saat itu berhasil membuat pernyataan dengan Sultan Basyaruddin, memasukkan wilayah Percut dibawah Kesultanan Serdang tahun 1863 M. Pada tahun 1865, Belanda menyerang Kesultanan Serdang dengan alasan Serdang sedang berselisih dengan Deli mengenai wilayah Percut. Belanda merampas wilayah Percut dari Serdang yang tercantum dalam laporan “Militaire Expeditie Tegen Serdang En Asahan” (Ekspedisi militer melawan Serdang dan Asahan) tahun 1865 M. Sultan Basyarudin pada akhirnya berhasil ditahan oleh Belanda (Batubara, Taslim; Titin, 2019). Berkat bantuan yang dilakukan oleh Cats Baron de Raet, Kejeruan Percut dapat membangun hubungan baik dengan Deli melalui ikatan perkawinan. Namun mengenai penentuan batas-batas wilayah percut belum selesai, kelak perbatasannya berada antara Deli dan Serdang (Tengku Luckman Sinar, 1986, p. 21).

Kontrolir Cats Baron de Raet, mencatat mengenai perebutan wilayah yang terjadi di Kesultanan Deli dan Serdang. Pada tanggal 24 Februari 1865 M, ia mendapatkan informasi bahwa Sultan Serdang berkeinginan untuk menguasai Denai. Kemudian, pada 10 Maret 1865 M, ia kembali

mendapatkan kabar bahwa Serdang akan menaklukkan Denai karena masih berada di wilayahnya. Dengan menempatkan pasukan yang berjumlah 900 orang di dekat Sungai Ular dan di pinggir Sungai Tuan.

Wilayah Denai masih menjadi perdebatan antara Kesultanan Deli dan Serdang. Menurut Deli, wilayah Denai melingkupi seluruh batang Sungai Ular sampai ke Timbang Langkat. Menurut Serdang, wilayah Denai melingkupi lembah muara Sungai Ular dan Sungai Denai. Oleh karena itu, hal ini menjadi penyebab Kesultanan Serdang menyerang Deli. Tetapi, dengan kehadiran Residen Netscher tahun 1865 M, wilayah Percut dan Denai diserahkan kembali kepada Deli. Wilayah Senembah menjadi urusan Residen Belanda sehingga tidak termasuk wilayah dari kedua kesultanan ini (Pelly, Usman; R, Ratna; Alfian, 1986).

“Mengenai dampak yang dihasilkan dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang, memiliki pengaruh yang negatif. Hubungan keduanya tidak terjalin dengan baik, walaupun ada usaha untuk memperbaikinya melalui perkawinan yang memiliki tujuan politis. Belanda pun membaca situasi ini dan mencoba untuk mencampurinya. Dalam hal ini, Sultan Serdang tidak menerima mengenai penentuan wilayah-wilayah tersebut oleh pihak Belanda yang dihadiahkan kepada Deli” (wawancara dengan Suprayitno, tanggal 20 September 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab terjadinya perpecahan antara Kesultanan Deli dan Serdang, yaitu keempat putra dari Tuanku Panglima Paderap yang merupakan Sultan Deli ketiga merasa layak menggantikan ayahandanya, diantaranya Tuanku Jalaluddin, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Wahidin, dan Tuanku Umar. Tuanku Jalaluddin tidak bisa menjadi penerus ayahnya, karena menurut hukum adat seorang pengganti sultan harus sehat jasmani, Sedangkan Tuanku Jalaluddin memiliki cacat pada fisiknya. Perebutan kekuasaan semakin meruncing antara Tuanku Panglima Pasutan dengan adiknya yaitu Tuanku Umar. Seharusnya Tuanku Umar layak menjadi penerus Sultan Deli selanjutnya karena ia merupakan putera sah permaisuri (Gahara). Akan tetapi, karena pengaruh dari Tuanku Panglima Pasutan lebih kuat maka ia menjadi Sultan Deli ke IV menggantikan ayahandanya pada tahun 1728 M. Ia juga mengusir Tuanku Umar dan ibunya yang bernama Puan Sampali ke Kampung Besar Serdang, yang nantinya wilayah ini akan menjadi pusat dari Kesultanan Serdang.

Setelah Tuanku Umar mendirikan Kesultanan Serdang yang dinobatkan oleh Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Tanjung Merawa, beserta utusan dari Sultan Aceh yaitu Kejuruan Lumu mengangkat dan menobatkan Tuanku Umar sebagai Raja Negeri Serdang yang pertama dengan pusat pemerintahan di muara sungai Serdang (Belumai) pada tahun 1723 M. Pertikaian antara Kesultanan Deli dan Serdang terus berlanjut dengan beberapa penyebab, yaitu perebutan suksesi, perluasan wilayah yang bertujuan untuk mendapat dukungan, sumber daya alam, dan perdagangan dengan tujuan ekonomi. Kontestasi politik yang dilakukan antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur tentunya ada campur

tangan dari pihak lain, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Siak Sri Indrapura dan Pemerintah Kolonial Belanda.

Bentuk dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur tahun 1800-1865, yaitu perluasan wilayah dan kebijakan ekonomi. Dalam hal perluasan wilayah, keduanya saling berebut pengaruh. Kesultanan Serdang lebih agresif dalam memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah, seperti Denai, Percut, Bedagai, Perbaungan, Senembah dan Padang (Tebing Tinggi). Untuk kebijakan ekonomi, kedua Kesultanan saling merebut wilayah pesisir yang akan dijadikan sebagai pelabuhan. Kesultanan Deli lebih diuntungkan karena wilayah Labuhan Deli yang menjadi tempat pelabuhan. Kegiatan perdagangan di Labuhan Deli sangat pesat dan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing karena wilayahnya yang cukup strategis. Kemudian, komoditi yang banyak dicari pada saat itu adalah lada. Catatan pihak asing menyebutkan bahwa kegiatan ekspor lada ke Penang dan Malaka jumlahnya lebih banyak Kesultanan Deli daripada Serdang. Tahun 1822 M, Deli mengekspor sekitar 26.000 pikul sedangkan Serdang sekitar 8.000 pikul.

Ada beberapa dampak dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di tahun 1800-1865, diantaranya dari sistem pemerintahan, wilayah dan ekonomi. Dampak pertama, kedua kesultanan ini memiliki perbedaan dari sistem pemerintahan, Kesultanan Deli memiliki *Datuk Empat Suku* sebagai juru nasihat sultan, sedangkan Kesultanan Serdang memiliki *Wazir Berempat* yang menjadi penasihat sultan. Untuk dampak selanjutnya, beberapa wilayah seperti Kedatukan Sunggal dan Percut memberontak ke Deli untuk memerdekakan diri. Hal ini dimanfaatkan Serdang untuk membantu Percut melawan Deli. Dampak terakhir dari segi ekonomi, kedua kesultanan sama-sama membangun infrastruktur. Seperti pembangunan istana, membentuk para prajurit, serta memakmurkan rakyat yang berada wilayah kekuasaannya. Namun, dampak negatifnya yaitu tidak baiknya hubungan kekerabatan yang bisa dirasakan hingga saat ini.

B. Saran

1. Bagi Yayasan Kesultanan Serdang, selaku pihak yang menulis beberapa sejarah mengenai Kesultanan yang ada di Sumatera Timur, sebaiknya lebih objektif dalam menuliskan sejarah.
2. Bagi Yayasan Ma'moen al-Rasyid, selaku dari pihak Kesultanan Deli, sebaiknya lebih banyak menyediakan beberapa literatur mengenai sejarah dari Kesultanan Deli. Selain itu, setidaknya menyediakan beberapa arsip sebagai bukti peninggalan dari Kesultanan Deli. Pihak Kesultanan Deli juga sangat sedikit menuliskan sejarahnya, setidaknya kegiatan menulis itu menunjukkan rasa kepedulian terhadap sejarahnya sendiri.
3. Bagi Pemerintah, khususnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, sebaiknya memperhatikan dan menjaga beberapa arsip mengenai Kesultanan Deli dan Serdang. Hal ini dikarenakan pentingnya menjaga ingatan bagi masyarakat, khususnya para akademisi, peneliti, filolog, dan sejarawan.
4. Bagi Masyarakat Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, sebaiknya mengetahui sedikit banyaknya mengenai sejarah dari Kesultanan Deli dan Serdang. Juga mengetahui asal-usul nama wilayah yang ada di Kabupaten Deli Serdang, seperti Percut, Denai, Perbaungan, Senembah, Labuhan Deli, Perbaungan, dan sebagainya. Perlu kesadaran bagi kita untuk tetap menceritakan sejarah khususnya bagi generasi yang akan datang.
5. Semoga semakin banyak akademisi dan peneliti yang mengangkat mengenai sejarah lokal di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa banyak sekali sumber-sumber sejarah yang bisa didapatkan, tentu harus dimunculkan untuk menjaga keberadaannya, serta menjadi pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber Primer:

A. Naskah

Mededeelingen van De Afdeeling Betuurszaken Der Buitengewesten van Het Departement van Binnenlandsch Bestuur Serie A No.3 Overeenkomsten Met De Zelfbesturen In De Buitengewesten. RetrievedFrom.

<https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB18A:013104000:00043&query=acte+van+erkenning+netscher&coll=boeken&rowid=4>

II. Sumber Sekunder:

B. Sumber Buku dan Jurnal

Abdurrahman, D. (2019). *Metodologi penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.

Ahmad, A. S. (1979). *Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Arifin, T. M. (1987). *Kisah dan Peristiwa yang Berkaitan Dengan Sejarah Negeri Serdang*. Jakarta: CV Nugraha.

Azhari, I. (2013). *Kesultanan Serdan: Perkembangan Islam Pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Basarshah II, L. S., Sinar, S., Sinar, T. S., & Umry, S. H. (2007). *Mahkota Adat dan Budaya Melayu Serdang*. Medan: Kesultanan Serdang.

Batubara, T. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang)*. Yogyakarta: Atap Buku.

Breman, J. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: GM.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Jones, P., Bradbury, L., & Boutillier, S. L. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: YOI.
- Jufrida. (2008). Latar Belakang Perpindahan Pusat Kesultanan Deli dari Pekan Labuhan ke Kota Medan. *Sangkhakala* , 61-69.
- Jufrida, & Ery, S. (2004). Jejak Kejayaan Kerajaan Deli di Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. *Sangkhakala* , 34-42.
- Kartodirjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lailatussyukriyah. (2014). Historiografi Sumatera Dalam Literatur Legendaris Inggris Abad 19. *Jurnal Seuneubok Lada* , 38-52.
- Mas'udi. (2015). Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik: Perubahan Sosial Dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. *Fikrah* , 177-200.
- Mugiyono. (2016). Integrasi Pemikiran dan Peradaban Melayu: Studi Eksploratif Historis Terhadap Perkembangan Peradaban Melayu Islam di Nusantara. *JIA* , 23-45.
- Mulyadi. (2002). Konflik Sosial Ditinjau Dari Segi Struktur dan Fungsi. *Humaniora* , 1-18.
- Nambo, A. B., & Puluwuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). *Unisba* , 262-285.
- Nasution, A. H., & Satria, B. (2017). Labuhan Deli Sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli Abad XVIII. *Historis* , 7-14.
- Nasution, J. (2018). Transformasi Modernitas di Kota Medan: Dari Kampung Medan Putri Hingga Gemeente Medan. *Jurnal Sejarah* , 65-83.
- Noer, D. (1983). *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Pelly, U. (2016). *Etnisitas Dalam Politik Multikultural*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pelly, U., & dkk. (2019). *Tak Hilang Melayu di Bumi*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pelly, U., R, R., & Alfian, T. I. (1986). *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG.
- Perret, D. (2011). Sumatera Timur Laut dalam Ruang Aceh sehingga Akhir Perang Aceh. *Jurnal Terjemahan Alam & Tamaddun Melayu* , 73-97.
- Priyadi, S. (2020). *Hisoriografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Reid, A. (2007). *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: YOI.
- Reid, A. (2012). *Sumatera Revousi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *al-Adyan* , 216-230.
- Sahya, A. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said, M. (1961). *Aceh Sepanjang Abad*. Aceh: Waspada.
- Sangti, B. (1997). *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar Company.

- Sinar, L. (1971). *Sari Sejarah Serdang Jilid I*. Medan: Balai Pustaka.
- Sinar, T. L. (tt). *Adat Raja-Raja Melayu Sumatera Timur dan Masalah Status Kerajaan (Swapraja) di Sumatera Timur*. Medan.
- Sinar, T. L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Sinar, T. L. (2003). *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*. Medan: Yandira Agung.
- Sinar, T. L. (1986). *Sari Sejarah Serdang 2*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Sufi, R. d. (2000). *Kerajaan-Kerajaan Tradisional di Sumatera Utara*. Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang)*. Yogyakarta: Atap Buku.
- Supriyadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta: Pranamedia Grup.
- Takari, M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. Medan: USU Press.
- Yatim, B. (2008). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Grafiti Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fachri Syauqii
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 03 Oktober 1999
Alamat : Jl. Camar II No. 182
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. Hp : 08116216084
Email : fachrisyauqii770@gmail.com

Orang Tua

Ayah : Drs. Ahmad Yani Kisno

Ibu : Apriyani

Pekerjaan

Ayah : Guru Madrasah Swasta

Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SD MIN SEI AGUL (sekarang MIN 7 Medan)
2. MTSN 2 Medan
3. MA Swasta AL-ULUM
4. Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1666/IS.I/KS.02/08/2021

06 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Yayasan Kesultanan Serdang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Fachri Syauqii
NIM : 0602171002
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 03 Oktober 1999
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Perumnas mandala gg camar 2 no 182 Kelurahan Kenangan baru
Kecamatan Percut sei tuan

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl Abdullah Lubis No. 42 Kec. Babura, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Judul skripsi: Kontestasi Politik Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 Agustus 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. H. SORI MONANG, M.Th
NIP. 19741010 200901 1 013

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan



PERPUSTAKAAN & GALLERY
TENGKU LUCKMAN SINAR

Jl. Abdullah Lubis No. 42/47 Medan Telp. 061-4573330 Fax. 061-4153830
Email : luckmansinarlib@yahoo.com

Medan, 30 Agustus 2021

Nomor : 213/B/TLS/VIII/2021
Lampiran : -
Hal : Surat izin penelitian

Kepada yang terhormat:
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Sumatera Utara
di-
Medan

Dengan hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. Tengku Mira Sinar, MA
Jabatan : Kepala Perpustakaan Tengku Luckman Sinar

Menerangkan bahwa,

Nama : **Fachri Syauqii**
NIM : 0602171002
Jurusan / Jenjang Studi : Sejarah Peradaban Islam / S1

Telah disetujui untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Tengku Luckman Sinar sebagai syarat dalam menyusun skripsi dengan judul:

**"KONTESTASI POLITIK KESULTANAN DELI DAN SERDANG
DI SUMATERA TIMUR TAHUN 1800-1865"**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



LAMPIRAN

NAMA-NAMA INFORMAN

1. Informan pertama

Nama : Hj. Tengku Mira Rozanna Sinar, M. Hum

Pekerjaan : Ketua Yayasan Taman Baca Tengku Luckman Sinar

Umur : 50 tahun

Alamat : Jl. Abdullah Lubis

Alumni : Universitas Sumatera Utara



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Hj. Tengku Mira Rozanna Sinar, M. Hum

2. Informan kedua

Nama : Tengku Moharsyah
Pekerjaan : Tour Guide Istana Maimun
Umur : 42 tahun
Alamat : Jl. Berigjend Katamso



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Tengku Moharsyah

3. Informan ketiga

Nama : Dr. Suprayitno, M. Hum
Pekerjaan : Dosen Universitas Sumatera Utara (USU)
Umur : 60 tahun
Alamat : Jl. Marelan



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Dr. Suprayitno, M. Hum



Gambar 4: Peta Kesultanan Deli dan Serdang Tahun 1875

Transkrip Wawancara

Informan Pertama

Nama Narasumber : Hj. Tengku Mira Rozanna Sinar
Jabatan : Kepala Perpustakaan Tengku Luckman Sinar
Usia : 50 tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana Strata-2
Tanggal Wawancara : Senin, 13 September 2021/ Ba'da Zuhur

Saya : Perkenalkan nama saya Fachri Syauqii. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Sumatera Utara program studi Sejarah Peradaban Islam semester 9. Izin sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Tengku Mira Rozanna Sinar mengenai skripsi saya yang berjudul “Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865”. Berikut adalah daftar pertanyaan saya kepada Ibu: Sebelumnya izin ibu, apakah ada peninggalan arsip atau surat pengangkatan dari Sultan Deli yang ke IV, V, VI, dan VII yaitu Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Sultan Mangedar Alam, Sultan Osman Perkasa Alam?

Ibu Mira : Tidak Ada

Saya : Apakah ada peninggalan arsip atau surat pengangkatan dari Sultan Serdang yang ke I,II, III, dan IV yaitu Tuanku Umar Raja Junjungan, Tuanku Ainan Johan Alam Shah, Tuanku Sultan Thaf Sinar Bashar Shah, dan Tuanku Sultan Basyaruddin Syaiful Alam Shah?

Ibu Mira : Tidak Ada

Saya : Surat Pengangkatan untuk Tuanku Sultan Basyaruddin Syaiful Alam selaku Wazir Aceh ada

Saya : Dari beberapa literatur yang saya baca, *Datuk* Empat Suku memiliki peran penting dalam proses pengangkatan sultan. Kenapa *datuk* Hamparan Perak dan Sukapiring lebih memihak Tuanku Panglima Pasutan sedangkan *datuk* Sunggal dan Senembah memihak Tuanku Raja Junjungan?

Ibu Mira : Lahan datuk Hamparan Perak dan datuk Sukapiring ada di tengah kota Medan. Atas prakarsa keduanya ibukota Deli pindah dari Labuan ke Medan. Lahan istana Maimon milik Sukapiring.

Saya : Mohon maaf sebelumnya ibu, apakah ada tanggapan dari Kesultanan Deli sendiri ketika terjadinya perpisahan dengan Serdang bahwa yang layak menjadi penerus Panglima Paderap adalah Panglima Pasutan bukan Tuanku Umar Raja Junjungan?

Ibu Mira : Deli dan Serdang ibarat Solo dan Yogya. Saya bersyukur dilahirkan dari trah Sultan Serdang bukan dari trah Sultan Deli. Sultan Sulaiman satu-satunya Sultan Sumatera Timur yang mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI.



Foto ini menunjukkan legitimasi bahwa Serdang yang dituakan dan dihormati karena memiliki Pedang Bawar

Saya : Apakah ada perlombaan kebijakan ekonomi yang dilakukan antara Kesultanan Deli dan Serdang dari tahun 1800-1865?

Ibu Mira : Ada

Saya : Bagaimana perluasan wilayah yang terjadi antara Kesultanan Deli dan Serdang pada tahun 1800-1865?

Ibu Mira : Silahkan baca buku Bangun Runtuh

Saya : Apakah dari pihak ketiga yaitu Pemerintah Kolonial Belanda menulis laporan di tahun 1800-1865? Jika ada apakah ibu menyimpannya?

Ibu Mira : Silahkan baca buku Bangun Runtuh

Saya : Mohon maaf sebelumnya ibu, bagaimana pandangan ibu mengenai Kesultanan Deli?

Ibu Mira : Memprihatinkan

Informan Kedua

Nama Narasumber : **Tengku Moharsyah**
Jabatan : **Tour Guide Istana Maimun**
Usia : **42 tahun**
Pendidikan Terakhir : **-**
Tanggal Wawancara : **Jum'at, 17 September 2021/ Ba'da Ashar di Istana Maimun**

Saya : *Assalamu'alalaikum* pak, saya Fachri Syauqii, mahasiswa semester 9 program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, disini saya mengangkat skripsi yang berjudul "Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865. Pertanyaannya pak, bagaimana perpecahan antara Kesultanan Deli dan Serdang:

Tengku Moharsyah : Kesultanan Deli itu peradaban yang dimulai tahun 1612 dengan catatan duduk sebagai wazir baru sebuah negeri yang terbangun setelah Kerajaan Aru. itu 1630 dengan disebut Kerajaan Deli wazir negeri Aceh yang mana sultannya yang pertama itulah Panglima Gocah Pahlawan menjadi wazir dari negeri Aceh menduduki wilayah yang ditaklukan yaitu Aru yang akhirnya terbentuk menjadi Kesultanan Deli. Tahun 1612 itu sudah berdiri tapi belum secara hakikatnya resminya tahun 1630, tahun 1612 itu Kerajaan Aru takluk. Dalam perjalanannya, Sultan Deli pertama mangkat Panglima Gocah Pahlawan digantikan dengan Tuanku Panglima Perunggit. Tuanku Panglima Perunggit melaksanakan sebagai Sultan Deli yang kedua apa yang menjadi wazir negeri Aceh yang dalam perjalanannya masa beliau memimpin ada beberapa catatan-catatan akhirnya beliau berpulang masuk kepada Tuanku Panglima Paderap.

Masa Tuanku Panglima Paderap atau cucu dari Tuanku Panglima Gocah Pahlawan menjadi Sultan menggantikan ayahnya menggantikan kakeknya pada

masa itu Kesultanan Deli tumbuh menjadi sebuah negeri yang berlahan-lahan yang mensyiarkan daripada islam yang sebagai wazir Negeri Aceh. Semasa dalam perjalanannya Sultan Deli ke-III mangkat disitulah mulai adanya pergesekan diinternal Kesultanan Deli yang masih dibangun oleh tiga sultan tadi yang mana pada masa itu putra dari Panglima Paderap paling sulung, Tuanku Jalaluddin, tidak bisa meneruskan garis trah sebagai sultan Deli karena ada catatan yang tertuang dalam hukum kanun yang terganjal atau terdinding dari beliau, yang mana dalam hukum kanun itu ada beberapa hukum yang menjadi sahnya, mutlaknya, sempurnanya seorang sultan Deli, yang mana hukum kanun itu diletakkan pondasinya oleh sultan Deli pertama yang tertuang sampai hari ini, dimana sultan Deli ke-III semasa cucunya menjadi sultan dan berpulang, maka cicitnya, yang paling sulung tidak bisa meneruskan karena ada sebab tidak memenuhi syarat ketentuan di hukum kanun tersebut. karena memang ada masalah fisik, maka beliau terdinding, makanya oleh adik-beradik daripada putera Tuanku Panglima Paderap, adik-adik dari Tuanku Jalaluddin ini menjadi siapa yang lebih berhak, ada yang nomor dua Tuanku Panglima Pasutan, ada yang nomor tiga Tuanku Tawar, ada Tuanku Umar. Masing-masing mengklaim mereka yang bisa, karena abang paling sulung mereka terhalang karena ada hukum kanun. Semasa itu ada konflik internal yang paling tajam yang paling runcing itu ada Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar. Oleh perangkat Kesultanan Deli pada masa itu, dimediasi atau didudukkan atau dimusyawarahkan oleh perangkat Kesultanan Deli khususnya disitu Datuk Empat Suku, yang mana menengahi dari perangkat Kesultanan Deli termasuk Datuk Empat Suku itu diambil dari yang paling dituakan, yang paling dihargai, itulah Kedatukan Sunggal. Kedatukan Sunggal (Kedatukan Sri Indra Pahlawan) beliaulah termasuk datuk yang memperangkat menundukkan putera-putera Sultan Deli agar jangan terjadi perang saudara. Pada masa itu perang saudara itu sangat terbuka, karena masing-masing putera Kesultanan Deli ini punya pendukungnya dengan untuk kepentingan kontestasi politik Kesultanan Deli kedepan yang akhirnya dalam perjalanannya, Alhamdulillah musyawarah itu berhasil. Ditengahi, sewaktu berhasil ditengai Tuanku Umar menerima sebuah wilayah yang mana kalo dari kota Medan kita ini arah ke Selatan, dimana pada masa

itu diberikan sebuah wilayah, dimana sebuah wilayah itu sangat banyak sekali ditanami pepohonan Serdang, disitulah beliau membangun sebuah negeri yang baru yang disebut Kesultanan Serdang. Pada masa itu, Tuanku Panglima Pasutan meneruskan garis trah sebagai Sultan Deli ke-IV yang menggantikan ayahandanya, Tuanku Panglima Paderap dan menggantikan posisi abangnya yang tidak cukup memenuhi syarat dan ketentuan. Sewaktu beliau menjadi Sultan, Tuanku Panglima Pasutan oleh Sultan Deli kepada abangnya dibuat sebuah negeri atau daerah itulah yang dikenal namanya Metar Bilad Deli yang kawasannya lebih kecil dari Kesultanan Deli itulah daerah Labuhan atau Belawan, sebagai penghormatan. Itulah keturunan dari Tuanku Jalaluddin sampai hari ini. Sementara Tuanku Umar, beliau membangun negeri sendiri, beliau berdiri sendiri. Beliau tidak mau berada dibawah panji-panji daripada Kesultanan Deli beda dengan abangnya masih berada dibawah kekuasaan Deli Kejeruan Metar Bilad Deli Wazir Negeri Deli. Artinya dia sebuah negeri yang dipimpin juga oleh seorang pemimpin tapi pusatnya di Deli. Tapi, kalo Sultan Serdang menyatakan mereka berdiri sendiri. Pada masa itu, Tuanku Umar membangun negerinya yang dapat saya cerita, Tuanku Tawar mengikuti Tuanku Umar, makanya banyak keturunan Tuanku Tawar berada di Serdang dan sebagian lagi ada di Deli. Ini dikenal dengan bangsawan-bangsawan dari Denai. Jadi, dari pertanyaan memang bagaimana Kesultanan Serdang itu ada di masa Sultan Deli ke-IV karena Sultan Serdang pertama dengan Sultan Deli keempat itu adik beradik. Disitulah mulainya Kesultanan Serdang berdiri 1750-an sekian (kalo gak salah saya). Sementara, dalam nasab garis turun-temurun yang saya sudah sampaikan Tuanku Jalaludin itulah jadi nasab keturunan Metar Bilad Deli, Tuanku Panglima Pasutan inilah nasab Sultan Deli sampai hari ini keempat belas yang turun termurun, sementara kalo Tuanku Umar itulah Sultan Serdang turun temurun itulah sampai sekarang Tuanku Ameck, diatasnya seperti Tuanku Thaf Sinar, dan lain-lain. Sementara dari Tuanku Tawar (Denai). itu didalam kewaziran Sultan Deli ada disebut namanya Kejeruan Sei Tuan, sebenarnya disitu mereka. Makanya, ada Sembilan wilayah Sultan Deli ada salah satu namanya kewazirannya Kejeruan Sei Tuan sebenarnya disitu tapi sebagian nasabnya ada mengikut Serdang. itulah dari pertanyaan pertama.

Saya : Bagaimana posisi Datuk di Kesultanan Deli dan Serdang :

Tengku Moharsyah : Sewaktu adanya konflik internal, posisi tak bisa dilepaskan itu sarat kepentingan. Untuk mempunyai manfaat untuk pribadi wazir-wazir. Akan tetapi, kalo itu dilaksanakan akan terjadi perang saudara karena sarat kepentingan datuk-datuk atau ring satu Kesultanan Deli melihat putra-putranya lagi berkecamuk. Pasti terjadi perang. Tapi ini tidak ada sejarah terjadi perang yang besar atau perang saudara, karena menurut saya, datuk empat suku meletakkan posisi berada di tengah. Karena mereka tahu ini adalah putera-putera raja, putera-putera junjungan mereka yang harus mereka jaga, jangan sampai terjadi pertumpahan darah, kalo jadi pertumpahan darah datuk empat suku termasuk wazir-wazir ini akan pening kepalanya, korban jatuh, eksistensi mereka juga jatuh, dll. banyak resikonya. Sehingga mereka mengambil jalan tengah, yaitu musyawarah, yang Alhamdulillah musyawarah mufakat itu diterima kedua belah pihak. Antara Tuanku Panglima Pasutan dan Tuanku Umar. Yang artinya Tuanku Umar berada di wilayah kerajaan yang berdiri sendiri tetapi dikelilingi oleh Sultan Deli. Karena lewat dari Pakam, Perbaungan, Penggajahan, sudah daerah Bedagai. Bedagai wazir Deli. Sebelahnya sudah masuk Tebing, termasuk Wazir Deli juga. Berarti di tengah-tengah kerajaan Deli. Jadi posisi pada masa itu, datuk-datuk meletakkan posisi di tengah karena memang menjaga kestabilan daripada politik Sultan Deli, karena memang politik Sultan Deli masa itu ada terjadi konflik dengan Datuk Pulo Brayon, konflik dengan daerah Percut, dll. Datuk empat suku meletakkan posisi ditengah sehingga, Sultan Deli berdiri pengakuan. Karena Sultan Deli berdiri dari Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Artinya Sultan Deli ini terbentuk dari pengakuan, tapi Sultan Serdang terbentuk dari pengaduan. Karena sewaktu konflik sudah terbangun, supaya tidak terjadi perang, Tuanku Umar mengadu, artinya dia sama punya hak dengan Tuanku Pasutan, sebagai Sultan Deli. Dia mengadu yang artinya dia berhak karena terlahir dari putera Graha yaitu Puan Sampali, sehingga dalam pengaduan itu dia mencari kebenaran dalam jati dirinya untuk dikorelasikan mana yang sebenarnya paling berhak, tidak terjadi perang tapi didudukkan secara musyawarah. Sehingga dari pengaduan itu, sehingga clear, Tuanku Umar bangun negeri baru.

Makanya menurut saya, Sultan Deli pengakuan, Sultan Deli Pengaduan. Keduanya sebuah sinonim pengakuan dan pengaduan. Posisi datuk empat suku secara bijak melihat konflik internal ini duduk secara musyawarah dan mufakat, yang artinya ini ada sebuah negeri, ini ada sebuah lahan area, yang satu disini dan satunya lagi disini. Biarpun secara hakikatnya wilayah Kesultanan Serdang itu berada ditengah-tengah Kesultanan Deli.

Saya : Bagaimana penjelasan istilah beraja ke Aceh, bertuan ke Siak?:

Tengku Moharsyah : Semenjak Sultan Iskandar Muda wafat, penggantinya dihukum dalam Islam karena membuat masalah. Sehingga mewarisi anak perempuan, itu dikenal dengan Sultanah yang sebelumnya menikah dengan Sultan Iskandar Tsani yang pernah menggantikan Sultan Iskandar Muda. Ada dampak setelah Sultan Iskandar Muda wafat, karena penggantinya belum bisa bagaimana daya pikir, daya juang, daya mempertahankan, daya politik, dll. apalagi itu kepada anak perempuan dengan yang duduk sebagai menantu. Kelemahan itulah yang dimanfaatkan oleh Sultan Siak Sri Inderapura Riau, karena pada masa itu dari efek terjadinya perang Malaka berdampak kepada Siak karena memang pada masa itu terjadinya bahwasanya Kerajaan Malaka itu diserang Portugis. Dampak itu kepada pihak Malaka sehingga pada masa itu Siak yang berada di pesisir Pantai Timur dengan sendirinya menerima hasil impact itu. Dia besar kuat dan memiliki sekutu-sekutu. Kesultanan Deli setanah dari Sumatera pada masa itu melihat memakai sistem peluang survival bertahan dengan masa itu Sultan Amaludin Panglima Mangedar Alam, Sultan Deli keenam, dia harus bersekutu dengan Siak. Untuk semakin kuatnya Deli dalam kontestasi politiknya, memperluas daerahnya, karena Kerajaan Aceh sudah sangat lemah, karena dipimpin oleh Sultanah, dan Sultan Deli tidak mau menyembah kepada perempuan, karena hakikat dalam raja-raja Islam pemimpin itu laki-laki bukan perempuan, makanya pada masa itu dengan sistem politik Sultan Deli ke Siak, Siak sangat menerima Sultan Deli karena letak strategisnya sebagai pangkalan militer. Makanya pada masa itu, Kesultanan Siak tidak membuang peluang, Sultan Mangedar yang akhirnya memakai gelar Sultan

yang dilafaskan oleh seorang pemimpin laki-laki, itulah Sultan Siak, yang sebelumnya Sultan Deli memakai gelar dari Aceh yaitu Tuanku Panglima.

Karena Aceh lemah, Sultan Deli mengambil strategi ke Siak karena Siak memiliki banyak sekutu dan kerajaan besar dan persekutuan dengan raja-raja lain dan Portugis. Pada masa itulah ada istilah beraja ke Aceh karena tidak menghilangkan benang merah Tuanku Panglima Gocah Pahlawan tapi karena dia tidak menyembah kepada pemimpin perempuan daripada anak Sultan Iskandar Muda, makanya dia beraja ke Siak demi kepentingan politik untuk bisa masuk dalam sebuah negeri yang mempunyai sekutu-sekutu dalam menjaga wilayah dan untuk ekspansi Kesultanan Deli berikutnya. Hal yang paling mendasar dari ideology dari raja Melayu. Karena dari perjanjian-perjanjian Siak dengan negeri Eropa makanya wilayah Sultan Deli dulu itu ada yang belum menjadi wilayah Kesultanan Deli seperti Padang Deli, Serdang, Bedagai yang akhirnya masuk jadi Deli.

Saya : Bagaimana kondisi Ekonomi antara Kesultanan Deli dan Serdang tahun 1800-1865?

Tengku Moharsyah : Jika dilihat dari 1800-1865, dari Kesultanan Deli itu masih mengandalkan perkebunan Palawija seperti kelapa. Menurut catatan John Anderson, Sultan Deli dari tahun 1850-1858, negerinya belum ada istana, masih sangat tradisional. Masa Sultan Mahmud, beliaulah yang meletakkan dasar konsesi. Konsesi itu bagian daripada Belanda. Dari orang pemilik pertama dan kedua sepakat untuk bagi hasil, pembagian itu ada yang untuk pribadi, ada untuk wilayah. Menurut saya, pada tahun 1800-1865 itu masih memanfaatkan perkebunan pinang, palawija dan sumber daya alam yang ditanam untuk masyarakat dan kerajaan.

Saya : Bagaimana bentuk kontestasi politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang tahun 1800-1865?

Tengku Moharsyah : Kesultanan Deli dan Serdang saling memperebutkan wilayah Padang dan Bedagai.

Saya : Apa tanggapan Kesultanan Deli mengenai Kesultanan Serdang?:

Tengku Moharsyah : Jadi, Kesultanan Serdang tidak dipungkiri adalah nasab dari garis keturunan Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Seperti kata pepatah biarpun air dicincang, saudara itu tetap sedarah. Serdang adalah sebuah negeri yang dahulunya dibentuk oleh founding father Deli. Sultan Serdang dalam memainkan perannya berdiri sendiri dengan kebijakan budaya, adat, secara hakikatnya Serdang punya budaya atau adat yang dibesarkannya. Artinya sama-sama besar. Artinya apabila disakiti Deli pasti merasakannya dan apabila senang Deli juga merasakannya. Serdang itu bagian dari saudara sedarah.

Di Deli apabila seorang Deli mangkat, ada tahapan-tahapan secara adat sahnya Kesultanan Deli. Adanya pembacaan Ulon Janji oleh Datuk Sunggal, Surat Ceri oleh Hampan Perak (seperti SK), menyematkan pedang bawar oleh Datuk Senembah, menyematkan regalia lainnya oleh Sukapiring. Apa yang ada di Deli ini ada di Sultan Serdang. Sultan Serdang mengikuti apa yang dibuat di Deli dari moyangnya, makanya ketika Tuanku Umar harus dibacakan Ulon Janji oleh Kedatukan Sunggal.

Informan Ketiga

Nama Narasumber : Dr. Suprayitno, M. Hum
Jabatan : Kepala Prodi Jurusan Ilmu Sejarah S2
Universitas Sumatera Utara
Usia : 60 tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana Strata-3
Tanggal Wawancara : Senin, 20 September 2021/ 12:30 di Fakultas
Ilmu Budaya Sumatera Utara

Saya : *Assalamu'alaikum* Pak, perkenalkan saya Fachri Syauqii, mahasiswa semester 9 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kebetulan saya sedang menyusun skripsi yang berjudul "Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur Tahun 1800-1865. Jadi yang ingin saya tanyakan ke bapak, apa latar belakang terjadinya perselisihan antara Kesultanan Deli dan Serdang?"

Pak Suprayitno : Awalnya itu terjadi suksesi antara Tuanku Umar dengan Tuanku Panglima Pasutan. Kesultanan Melayu di Sumatera Timur memang begitu, apalagi ketika seorang pemimpin ingin mendirikan sebuah negeri, dia kan harus memiliki suatu wilayah. Salah satu saudara dari Tuanku Panglima Pasutan adalah Tuanku Jalaludin yang menguasai wilayah Metar masih berada di bawah Kesultanan Deli, maka dinamakan Metar Bilad Deli. Nanti coba kamu baca John Anderson dan juga beberapa literature di Schadee, itukan persoalan-persoalan wilayah yang jadi perebutan, misalnya senembah yang terbagi dua, yaitu Senembah Serdang dan Deli. Persoalannya ada pada wilayah dan tentu sumber daya. Kita lihat secara geografis, Deli di Labuhan Deli, kemudian Umar ini membuat wilayahnya di Kampung Besar. Wilayah itu semuanya daerah-daerah pantai muara sungai dengan laut. Hal ini penting untuk memonopoli perdagangan antara saudagar luar dan juga komoditas dari pedalaman. Pedalaman ini kan, kalo Deli tanah Karo kemudian Serdang ini kan pedalamannya Simalungun dan juga Karo. Jadi konteksnya itu, bagaimana mereka harus bisa menguasai wilayah dan sumber daya alam. Terutama adalah komoditas perdagangan. Jadi akar konflik, pertama suksesi, wilayah, dan penguasaan perdagangan. Jadi jalur-jalur perdagangan itu harus mereka kuasai supaya mereka

bisa eksis. Bagaimana bisa membangun istana, pasukan, kalo gak ada penghasilan. Ketika abad itu kan masih abad lada, gambir, kemenyan, gading gajah, budak dari pedalaman, budak laki-laki dihargai 1 dolar kalau perempuan 2 dolar dikirim ke semenanjung Malaka, rotan, belerang. Mungkin wilayah ketika itu belum begitu penting karena tanah belum punya arti secara ekonomi, tapi jalur perdagangan atau jalur bisnis itu yang harus dikuasai. Muara sungai, pertemuan antara dua sungai. Medan itu kan pertemuan antara sungai Babura dan sungai Deli. Hulu sungai Deli di Deli tua itu sungai Lautani. Kemudian Kuala Serdang, Batang Kuis, dan Lubuk Pakam. Jadi ini yang harus dikuasai oleh mereka, kalo mau besar. Jadi, komoditas itu dari pedalaman. Ketika Serdang muncung, lada menjadi booming, walaupun yang lain tetap. Jadi siapa yang menguasai pesisir dia bakalan besar. Karena mampu memungut cukai dari para saudagar yang membawa barang impor, seperti candu, mesiu, senjata, garam, kain sutera, dan peralatan rumah tangga, masuk dan yang memegang adalah syahbandar.

Dari pedalaman seperti lada yang dijadikan barang ekspor masuk ke pelabuhan dan ada cukai. Jadi, sumber konflik adalah sumber daya atau persoalan bisnis. Penguasaan sumber daya. Siapa yang menguasai pusat-pusat perdagangan, itu akan menjadi besar karena dia mendapatkan hasil, ekonomi, bisa membangun pasukan, dan istana sebagai simbol kebesaran. Mereka bersaing terus. Menurut John Anderson di tahun 1823, Kesultanan Deli pernah meminjam meriam untuk menakut-nakuti Raja Pulo Brayon. Sultan Deli masih kerabat dengan Kedatukan Sunggal, karena Gocah Pahlawan menikah dengan Nang Baluan Surbakti saudara dari Datuk Amar. Artinya Kalimbubu. Yang mengesahkan Kesultanan Deli itu kan Datuk Sunggal, tapi perang juga. Menurut Anderson, Deli sedang melebarkan kekuasaan pada saat dia datang. Kedua kesultanan sedang melebarkan kekuasaan khususnya di wilayah pedalaman. Dari pedalaman semua komoditas perdagangan yang dicari oleh pedagang asing, khususnya rempah-rempah. Lada itu sudah budidaya bukan hasil hutan, kalo sudah budidaya maka wilayah-wilayah dekat pesisir itu menjadi penting karena untuk menanam lada, perlu lahan yang besar. Yang menanam lada ini adalah orang-orang pedalaman. Terutama orang Karo, dan

penguasanya raja Urung. Sultan Deli memerintahkan tanam lada, karena pada saat itu paling laku, dan lada Sultan Deli paling banyak, Langkat, Sunggal, dan Serdang.

Latar belakang awal konflik ini yaitu suksesi, perebutan sumber daya, dan wilayah (tanah). Tanah ini menjadi penting untuk konsesi perkebunan. Tembakau itu butuh tanah karena masuknya kapitalisme. Jadi, kapitalisme itu kan butuh modal. Di Kesultanan Deli sudah ada industry. Kalo lada ini kan industry kampung (tradisional). Tanah menjadi penting karena nilai ekonominya itu. berebutlah soal tanah jadinya. Belanda menghentikannya. Padang Bedagai itulah contoh paling klasik, bagaimana kedua negeri ini berebut soal wilayah tersebut. kadang-kadang menjadi wilayah Deli, kadang-kadang menjadi wilayah Serdang. terakhir dikasikan Deli semua sama Belanda.

Belum dapat fakta mengenai adanya pencegatan kapal antara Deli dan Serdang. Ketika terjadi persoalan stabilitas keamanan di Kesultanan Deli dan Serdang. terutama masalah-masalah perampokan. Oleh karena itu, sungai Deli menjadi tidak aman. Itu dicatat dalam Baron Caets de Raet. Terjadi ketidaknyamanan dalam bisnis. Sultan Deli melahirkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi para pedagang-pedagang ini. Akibatnya, Serdang itu mendapat untung. Banyak kemudian, pedagang-pedagang itu menggunakan jalur lain dari mulai sungai Bandar Baru, Belumai, dan Percut. Jadi pedagang Karo memakai jalur ini untuk menghindari ketidaknyamanan ini. Ada kebijakan Sultan Deli yang tida disenangi, menurut bapak cukainya terlalu besar. Begitu juga Simalungun, Pertumbuhan melalui jalur lain ini. Ketika Serdang mendapat untung besar dari kondisi ini. Belum pernah ada pertempuran fisik.

Saya : Apa dampak dari perselisihan dari kedua Kesultanan ini?

Pak Suprayitno : Dampaknya negatif. Hubungan saudara tidak baik. Tapi, itu privasi mereka. Walaupun terkadang ada usaha melalui perkawinan untuk tujuan politik. Tapi itu tetap ada. Itukan awal-awal persoalan perpecahan. Dan terbaca ketika setelah Belanda datang bagaimana soal wilayah. Dalam persoalan batas-

batas wilayah itu Sultan Serdang paling rewel. Karena wilayahnya diserahkan Belanda kepada Deli.